

- (1) *Share of the product in total agricultural production is more than 5%; OR/AND*
- (2) *Share of the product in total calorie or protein domestic consumption more than 5%; OR/AND*
- (3) *Share of the product in total agricultural employment more than 5%; AND*
- (4) *The product is net imported or its export value is less than 5% of total world export.*

Indonesia belum sampai pada penentuan produk/komoditas PK sesuai dengan indikator yang telah disampaikan pada pertemuan Tingkat Menteri K-33¹⁰. Oleh karena itu, di bawah ini dicoba menggali berapa banyak PK yang dapat dipilih sesuai dengan indikator seperti yang telah disebut di atas. Indikator ke-4 adalah indikator amat penting dalam pemilihan tersebut, dan dalam makalah ini hanya dipusatkan pada *net import*, dengan pertimbangan ketersediaan datanya. Apabila indikator ke-4 terpilih, kemudian ditambah dengan salah satu dari indikator ke-1, atau ke-2, atau ke-3, maka produk tersebut layak diperlakukan sebagai PK. Khusus indikator ke-2, dirinci lagi dalam dua kelompok, yaitu kalori atau protein.

Data yang digunakan untuk menguji ke-4 indikator tersebut adalah berasal dari BPS yang dipakai dalam penyusunan I/O tahun 2000 dan data Susenas 2003. Kedua jenis data ini dipilih karena paling lengkap, sehingga tidak perlu mencarinya secara terpisah-pilah. Sedangkan data perdagangan tahun 2000-2002 diperoleh dari BPS (Statistik Ekspor dan Impor).

Proses penyaringan dilakukan dalam beberapa tahap analisa dan merupakan pengembangan dari metoda yang digunakan oleh Tim Peneliti pada tahun 2004 (lihat Hutabarat *et al.*, 2004). Tahap pertama, dihitung komoditas/produk pertanian yang menjadi *net import* rata-rata periode terakhir 2000-2002. Apabila produk/komoditas *net import* dirinci dalam HS 4 digit, maka tersaring 84 jenis produk *net importir* (Tabel 36). Hampir seluruhnya adalah berupa pangan, termasuk di dalamnya buah-buahan dan sayuran, daging, susu/keju, dan makanan jadi.

Tabel 36. Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Net Impor

No	Komoditas/Produk Olahan	Kode HS 4 Digit
1	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin	0201

¹⁰ Statement tertulis Menteri Pertanian RI, *Discussion Brief on SP and SSM*, yang disampaikan pada pertemuan Tingkat Menteri di Jakarta tanggal 11 Juni 2005. Indikator itu masih ada kaitannya dengan Non Paper by Indonesia, "Specific Modalities input on Special Products" yang disampaikan at G-33 Countries Meeting in Geneva, 8 Desember 2003. Bahan ini, hampir seluruhnya diambil dari P.Simatupang (2003), "Justifikasi dan Metoda Penetapan Komoditas Strategis". Sayang makalah tersebut tidak pernah dibahas/didiskusikan secara terbuka, dan ternyata langsung diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.

pos tarif total yang mempunyai kisaran dari 60,3 persen–887,4 persen dan rata-rata 116,17 persen.

Lima negara yang mempunyai pos tarif terbanyak di jenjang 1 adalah China dengan 586 pos tarif (20,35%); Korea, 571 pos (19,83%); Turki dan Panama masing-masing 281 pos tarif (9,76%); dan Pantai Gading, 238 pos (8,27%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Tanzania, Uganda, St Vincent, Zambia, dan Zimbabwe.

Untuk jenjang 2, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1.037 pos tarif atau 17,43 persen dari pos tarif di kelompok ini; El Salvador, 603 pos (10,14%); Filipina, 517 pos (8,69%); Korea Selatan 343 pos (5,77%); dan China, 329 pos (5,53%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Kitts dan Nevis, St. Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St. Vincent, dan Zambia.

Pada jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Indonesia yang mempunyai 224 pos tarif (16,72%); Benin, 201 pos (15,0%); Korea Selatan, 183 pos (13,60%); Turki, 149 pos (11,12%); dan Filipina, 91 pos (6,79%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Antigua, Belize, Barbados, Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, dan Zimbabwe.

Di jenjang 4, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Pakistan yang memiliki 685 pos (10,74%); India, 574 pos (8,94%); St Lucia, 309 pos (4,84%); St Vincent, 302 pos (4,24%); St Kitts dan Nevis, 279 pos (4,73%). Sedangkan yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Filipina, Senegal, Suriname.

Di Indonesia, hanya terdapat satu komoditas (*chapter*), yaitu kelompok 11 dengan empat pos tarif di jenjang 1 menurut usulan Australia dan Amerika Serikat, dengan nilai tarif yang sama 9,00 persen. Sedangkan di jenjang 2, lima komoditas dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah kelompok 15 (lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati) dengan jumlah 93 pos dengan rata-rata 39,84 persen dalam selang 35 persen–40 persen diikuti oleh kelompok 12 (biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami; dan makanan ternak) dengan jumlah 78 pos dengan rata-rata 39,04 persen, berkisar dari 27

persen–40 persen, kelompok 20 dengan jumlah 67 pos (olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dan rata-rata 40 persen karena bernilai sama, kelompok 11 (produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum) dan 14 (bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) masing-masing berjumlah 61 pos dan rata-rata 40 persen dan bernilai sama.

Di jenjang 3, Indonesia memiliki lima komoditas dengan pos tarif terbanyak, yaitu kelompok 20 dengan 49 pos yang bernilai sama, yaitu 50 persen, kelompok 7 dengan 48 pos yang berkisar antara 50 persen–60 persen dan rata-rata 50,83 persen, kelompok 8 dengan 42 pos dengan kisaran 50 persen–60 persen dan rata-rata 54,05 persen, kelompok 2 (daging dan sisa daging yang dapat dimakan) dengan 39 pos yang bernilai sama 50 persen, dan kelompok 9 (kopi, teh dan rempah-rempah) dengan 16 pos dalam kisaran 50 persen–60 persen dengan rata-rata 55 persen.

Di jenjang 4 Indonesia hanya memiliki 4 kelompok (digit 2) yang memiliki pos tarif, yaitu kelompok 22 (minuman, alkohol, dan cuka) dengan sebanyak 42 pos dalam selang 70 persen -150 persen dengan rata-rata 136,67 persen, kelompok 17 (gula dan kembang gula) dengan jumlah 14 pos dengan nilai tarif yang sama 95 persen, kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan 12 pos dengan nilai tarif yang sama 210 persen dan kelompok 10 yang memiliki 8 pos tarif dengan nilai yang sama, 160 persen.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, usulan Uni Eropa tentang "band" dan "threshold" atau penjenjangan tarif sama seperti K 20, namun berbeda dalam rumus penurunan tarifnya.

4.4.2. Skenario Penurunan Tarif

Sampai kini telah banyak usulan modalitas penurunan tarif (*bound tariff*) yang menjadi implementasi kesepakatan dalam pilar akses pasar. Sampai saat tercapainya kesepakatan di bulan Juli 2004 yang tertuang dalam paket Juli 2004 tercatat ada tiga macam usulan, yaitu: 1) Metoda Harbinson/Rumus Uruguay, 2) Rumus Swiss (*Swiss Formula*), dan 3) Rumus Berjenjang (*Tiered Formula*). Sementara itu, sejak Juli 2004 rumus-rumus tersebut mulai diimplementasikan melalui usulan-usulan yang dikenal dengan: (1) Usulan K 20, (2) Usulan Australia, (3) Usulan Amerika Serikat, (4) Usulan Uni Eropa yang berbeda satu sama lain. Seperti dikemukakan sebelumnya, K 20 mengusulkan 4 jenjang (*threshold* atau *band*) untuk seluruh pos tarif untuk NB dengan kisaran sebagai berikut: jenjang 1, $T \leq 30$ persen; jenjang 2, $30 \text{ persen} < T \leq 80$ persen; jenjang 3, $80 \text{ persen} < T \leq 130$ persen; dan jenjang 4, $T > 130$ persen, sedangkan penurunan tarifnya diusulkan secara garis lurus ("*linear cut*") dan dilakukan melalui dua skenario, sebagai berikut:

1. Skenario a: Jenjang 1 diturunkan 25 persen
Jenjang 2 diturunkan 30 persen
Jenjang 3 diturunkan 35 persen
Jenjang 4 diturunkan 40 persen
2. Skenario b: Jenjang 1 diturunkan 45 persen
Jenjang 2 diturunkan 55 persen
Jenjang 3 diturunkan 65 persen
Jenjang 4 diturunkan 75 persen

Untuk negara maju K 20 mengajukan usulan penurunan tarif yang berbeda menurut jenjang (5 buah) dan tingkat penurunannya, sebagai berikut: jenjang 1, $T \leq 20$ persen; jenjang 2, $20 \text{ persen} < T \leq 40$ persen; jenjang 3, $40 \text{ persen} < T \leq 60$ persen; jenjang 4, $60 \text{ persen} < T \leq 80$ persen; dan jenjang 5, $T > 80$ persen. Tingkat penurunannya dilakukan secara garis lurus dan tingkat penurunan tarif bagi tarif yang tinggi lebih besar daripada tingkat penurunan tarif bagi tarif yang rendah. Sampai saat ini K 20 belum mempunyai usul yang nyata untuk penurunan tarif itu.

Usulan pengurangan tarif dari Australia dan Amerika Serikat menetapkan jenjang pos tarif yang sama dan berjumlah 4 dan untuk NB dan NM juga sama, yaitu: jenjang 1, $T \leq 20$ persen; jenjang 2, $20 \text{ persen} < T \leq 40$ persen; jenjang 3, $40 \text{ persen} < T \leq 60$ persen; dan jenjang 4, $T > 60$ persen. Namun, tingkat pengurangan tarif di setiap jenjang dari usulan Australia dan Amerika Serikat berbeda:

1. Usulan Australia : Jenjang 1 diturunkan 55 persen
Jenjang 2 diturunkan 65 persen
Jenjang 3 diturunkan 75 persen
Jenjang 4 diturunkan 85 persen
2. Usulan Amerika Serikat: Jenjang 1 diturunkan antara 55–65 persen
Jenjang 2 diturunkan antara 65 -75 persen
Jenjang 3 diturunkan antara 75–85 persen
Jenjang 4 diturunkan antara 85–90 persen

Uni Eropa (UE) juga telah mengajukan usul penurunan dan jenjang tarif yang berbeda antara NB dan NM. Jenjang pos tarif usulan UE untuk NB sama seperti yang diusulkan K 20, yaitu: jenjang 1, $T \leq 30$ persen; jenjang 2, $30 \text{ persen} < T \leq 80$ persen; jenjang 3, $80 \text{ persen} < T \leq 130$ persen; dan jenjang 4, $T > 130$ persen, tetapi tingkat penurunannya adalah:

- Jenjang 1 diturunkan 20 persen
- Jenjang 2 diturunkan 30 persen
- Jenjang 3 diturunkan 40 persen

Jenjang 4 diturunkan 50 persen

Untuk NM, UE mengajukan usul sebagai berikut: jenjang 1, $T \leq 30$ persen; jenjang 2, $30 \text{ persen} < T \leq 60$ persen; jenjang 3, $60 \text{ persen} < T \leq 90$ persen; dan jenjang 4, $T > 90$ persen dengan tingkat penurunan tarifnya adalah:

Jenjang 1 diturunkan 20 persen

Jenjang 2 diturunkan 45 persen

Jenjang 3 diturunkan 50 persen

Jenjang 4 diturunkan 60 persen

Usulan K 20

Dengan penurunan tarif sebesar 25 persen pada Jenjang 1, secara umum rata-rata tarif berubah dari 18,99 persen menjadi 14,24 persen dengan selang dari 0 persen sampai 22,5 persen; sedangkan penurunan tarif pada jenjang 2 sebesar 30 persen menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran 21,56 persen–56 persen; penurunan 35 persen pada jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 103,92 persen menjadi 67,55 persen yang berkisar dari 52,65 persen–84,5 persen; dan penurunan tarif sebesar 40 persen pada jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 186,91 persen menjadi 112,14 persen yang berkisar dari 78,24 persen–532,44 persen.

China dengan jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 1 mengalami penurunan tarif dari rata-rata 15,30 persen menjadi 11,48 persen yang berkisar dari 0 persen–22,5 persen; Korea Selatan pada urutan nomor 2 dalam jumlah pos tarif mengalami penurunan tarif dari rata-rata 17,03 persen menjadi 12,77 persen dengan kisaran 1,35 persen–22,5 persen; Turki mengalami penurunan tarif dari 14,60 persen menjadi 10,95 persen, yang berkisar dari 0 persen–22,5 persen; Panama mendapatkan penurunan tarif dari 12,01 persen menjadi 9,01 persen dalam selang 0,75 persen–22,5 persen dan Filipina mendapatkan penurunan tarif dari 20,30 persen menjadi 15,23 persen dalam selang 2,25 persen–22,5 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 29,19 persen menjadi 18,10 persen, yang berkisar antara 6,75 persen–20,25 persen.

Di jenjang 2, Indonesia yang memiliki pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 42,78 persen menjadi 29,95 persen pada kisaran 29,5 persen–49 persen; diikuti masing-masing oleh Guatemala yang mendapatkan penurunan tarif dari 40,51 persen menjadi 28,36 persen dalam kisaran 24,5 persen–52,5 persen; El Salvador dengan penurunan tarif dari 43,12 persen menjadi 30,18 persen dalam selang 24,5 persen–55,3 persen; Filipina dengan penurunan tarif dari 41,03 persen menjadi 28,72 persen pada kisaran 24,5 persen–42 persen; dan Korea Selatan mendapatkan penurunan tarif dari 47,68 persen menjadi 33,38 persen dalam selang dari 22,05 persen–50,4 persen.

Pakistan dengan jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 3 mengalami penurunan tarif dari 100 persen menjadi 65 persen, diikuti masing-masing oleh India yang mendapatkan penurunan tarif dari 99,54 persen menjadi 64,70 persen dalam selang 55,25 persen–65 persen; St Lucia dengan penurunan tarif dari 106,28 persen menjadi 69,08 persen dalam selang 65 persen–84,5 persen; St Vincent mengalami penurunan tarif dari 105,29 persen menjadi 68,44 persen dalam kisaran dari 65 persen–84,5 persen; dan Belize dengan penurunan tarif dari 101,80 persen menjadi 66,17 persen yang berada dalam kisaran 65 persen–71,5 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0 persen menjadi 61,75 persen untuk semua pos tarif sebanyak 14 di jenjang itu.

Pada kelompok 4, India yang memiliki jumlah pos tarif yang tertinggi mendapatkan penurunan tarif dari 165,66 persen menjadi 99,40 persen dalam selang dari 150 persen–300 persen, diikuti Nigeria dengan penurunan tarifnya dari 150 persen menjadi 90 persen; Zimbabwe dengan tarif yang menurun dari 150 persen menjadi 90 persen; Korea Selatan dengan tarifnya yang menurun dari 463,22 persen menjadi 277,93 persen yang ada pada kisaran dari 86,4 persen–532,44 persen; Indonesia yang menurunkan tarifnya dari 169,55 persen menjadi 98,73 persen, yang ada pada selang dari 150 persen–210 persen.

Usulan Australia dan Amerika Serikat (tingkat minimal)

Penurunan tarif sebesar 55 persen di jenjang 1 secara umum menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 12,54 persen menjadi 5,64 persen dengan kisaran dari 0 persen–9 persen, sedangkan penurunan tarif sebesar 65 persen di jenjang 2 menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 35,42 persen menjadi 12,40 persen dengan kisaran dari 7,07 persen–14 persen; penurunan tarif sebesar 75 persen di jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 52,62 persen menjadi 13,15 persen dalam rentang tarif dari 10,1 persen–15 persen; penurunan tarif sebesar 85 persen di jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 116,17 persen menjadi 17,43 persen dalam rentang tarif dari 9,05 persen–133,11 persen.

China yang memiliki pos tarif terbanyak di jenjang 1 mendapatkan penurunan tarif dari 10,81 persen menjadi 4,87 persen dalam selang 0 persen–9 persen, diikuti oleh Korea Selatan dengan penurunan tarif dari 12,74 persen menjadi 5,72 persen dalam kisaran 8,81 persen–9 persen; Turki mengalami penurunan tarif dari 12,32 persen menjadi 5,59 persen, pada kisaran 0–9 persen; Panama dari 10,79 persen menjadi 4,83 persen dalam selang 0,45 persen–9 persen dan Pantai Gading dari 14,07 persen menjadi 6,33 dalam selang 1,8 persen–6,75 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari 12,4 persen menjadi 4,1 persen dengan nilai yang sama untuk sebanyak 4 pos tarif.

Pada jenjang 2, Indonesia dengan tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 39,76 persen menjadi 13,92 persen dalam selang

9,45 persen–14 persen disusul oleh El Salvador dari 35,70 persen menjadi 12,50 persen dalam selang 8,75 persen–14 persen; Filipina dari 37,25 persen menjadi 13,04 persen, yang ada pada kisaran dari 8,75 persen–14 persen; Korea Selatan dari 28,84 persen menjadi 10,10 persen pada kisaran 7,35 persen–14 persen; dan China dari 26,84 persen sampai 9,39 persen dalam selang 7,07 persen–14 persen.

Dalam jenjang 3, Indonesia dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 54,71 persen menjadi 13,68 persen dalam selang 11,25 persen–15 persen disusul Benin dari 60 persen menjadi 15 persen yang semuanya sama bagi 201 pos tarif; Korea dari 49,85 persen menjadi 12,46 persen, yang berkisar dari 10,13 persen–13,5 persen; Turki dari 51,12 persen menjadi 12,78 persen dan berkisar dari 10,13 persen–15 persen; dan Filipina dari 49,07 persen menjadi 12,27 persen pada kisaran 1,25 persen–15 persen.

Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 4 mengalami penurunan tarif dari 101,09 persen menjadi 10,11 persen dalam selang 10 persen–15 persen diikuti India dari 128,14 persen–12,81 persen dalam kisaran 7,5 persen–30 persen; St Lucia dari 111,91 persen menjadi 11,19 persen yang ada pada kisaran 10 persen–25 persen; St Vincent dari 110,97 persen menjadi 11,10 persen dalam selang 10 persen–25 persen; dan St Kitts dan Nevis dari 108,56 persen menjadi 10,86 persen dalam rentang 9,3 persen–25 persen. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0 persen menjadi 21,5 persen dalam rentang nilai tarif dari 10,5 persen–31,5 persen.

Selain itu Amerika Serikat juga mengusulkan penurunan tarif secara radikal dimana pos tarif di jenjang 1 dengan penurunan 65 persen; di jenjang 2 dengan penurunan 75 persen; di jenjang 3 dengan penurunan 85 persen; dan di jenjang 4 dengan penurunan 90 persen. Dengan menerapkan skenario ini maka di jenjang 1 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 12,53 persen menjadi 4,39 persen dengan selang antara 0 persen–7 persen; di jenjang 2 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 35,42 persen menjadi 8,86 persen dengan selang antara 5,05 persen–10 persen; di jenjang 3 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 52,62 persen menjadi 7,89 persen dengan selang dari 6,075 persen–9 persen; di jenjang 4 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 116,17 persen menjadi 11,62 persen dalam rentang tarif dari 6,03 persen–88,74 persen.

Dengan penurunan yang radikal ini, China dengan pos tarif terbanyak di jenjang 1, mengalami penurunan tarif dari 10,81 persen menjadi 3,78 persen dengan kisaran dari 0 persen–7 persen disusul Turki dari 12,74 persen menjadi 4,46 persen pada selang 0,63 persen–7 persen; Panama dari 10,74 persen menjadi 3,76 persen yang ada pada kisaran 0,35 persen–7 persen; Pantai Gading dari 14,07 persen menjadi 4,93 persen dalam kisaran 1,4 persen–5,25 persen. Untuk Indonesia terjadi penurunan tarif dari 12,4 persen menjadi 3,15 persen untuk semua pos tarif.

Indonesia dengan pos tarif terbanyak di jenjang 2 mendapatkan penurunan tarif dari 39,76 persen menjadi 9,94 persen dalam kisaran 6,75 persen–10 persen, diikuti El Salvador dari 35,70 persen menjadi 8,93 persen yang ada pada kisaran 6,25 persen–10 persen; Filipina dari 37,25 persen menjadi 9,31 persen dalam selang 6,25 persen–10 persen; Korea dari 28,84 persen menjadi 7,12 persen dalam kisaran 5,25 persen–10 persen; China dari 26,84 persen menjadi 6,71 persen yang ada pada kisaran 5,05 persen–10 persen.

Indonesia yang pada jenjang 3 juga mempunyai pos tarif terbanyak dalam skenario radikal ini mengalami penurunan tarif dari 54,71 persen menjadi 8,21 persen, yang berada dalam kisaran 6,75 persen–9 persen; diikuti Benin dari 60 persen menjadi 9 persen untuk semua pos tarif; Korea dari 49,85 persen menjadi 7,48 persen dengan kisaran 6,08 persen–8,1 persen; Turki dari 51,12 persen menjadi 7,67 persen pada kisaran 6,08 persen–0 persen; Filipina dari 49,07 persen menjadi 7,36 persen.

Dalam jenjang 4 dimana Pakistan mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 101,09 persen menjadi 15,16 persen yang ada dalam kisaran 15 persen–30 persen disusul India dari 128,14 persen menjadi 19,22 persen dalam kisaran 11,25 persen–45 persen; St Lucia dari 111,91 persen menjadi 16,79 persen dalam selang 15 persen–37,5 persen; St Vincent dari 110,97 persen menjadi 11,94 persen yang ada pada selang dari 10,5 persen–12 persen; dan St Kitts dan Nevis dari 108,56 persen menjadi 16,28 persen dalam kisaran 13,95 persen–37,5 persen. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0 persen menjadi 14,30 persen dalam kisaran 7 persen–21 persen.

Usulan Uni Eropa (UE)

Penurunan tarif sesuai dengan usulan UE menyebabkan pos tarif di jenjang 1 berubah dari 18,99 persen menjadi 15,19 persen yang berada dalam kisaran 0 persen–24 persen; di jenjang 2 berubah dari 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran 21,56 persn–56 persen; di jenjang 3 berubah dari 103,92 persen menjadi 62,35 persen dalam kisaran 48,6 persen–78 persen; dan di jenjang 4 berubah dari 186,91 persen menjadi 93,45 persen, yang ada dalam kisaran 65,2 persen–443,7 persen.

Pada jenjang 1 dimana China mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 15,30 persen menjadi 12,24 persen dalam kisaran 0 persen–24 persen, diikuti oleh Korea Selatan dari 17,03 persen menjadi 13,62 persen yang terbentang dari 1,44 persen–24,0 persen; Turki dari 14,60 persen menjadi 11,68 persen dalam bentang tarif dari 0 persen–24,0 persen; Panama dari 12,01 persen menjadi 9,61 persen dalam bentangan tarif dari 0,8 persen–24,0 persen; dan Filipina dari 20,30 persen menjadi 16,24 persen dalam rentang tarif dari 2,4 persen–24,0 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 24,14 persen menjadi 19,31 persen dalam rentangan dari 7,2 persen–24,0 persen.

Selanjutnya, di jenjang 2 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 42,8 persen menjadi 29,9 persen dalam rentang tarif dari 24,5 persen–49,0 persen, disusul masing-masing oleh Guatemala dari 40,5 persen menjadi 28,4 persen dalam rentang tarif antara 24,5 persen–52,5 persen; El Salvador dari 43,1 persen menjadi 30,2 persen dalam rentang tarif dari 24,5 persen–55,3 persen; Filipina dari 41,0 persen menjadi 28,7 persen dalam selang antara 24,5–42,0 persen; dan Korea Selatan dari 47,7 persen menjadi 33,4 persen dalam rentang tarif 22,1 persen–50,4 persen.

Di jenjang 3 yang menempatkan Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 100 persen menjadi 60 persen untuk semua pos tarif yang ada sebanyak 671, diikuti India dari 99,54 persen menjadi 59,72 persen dalam rentang tarif dari 51 persen–60 persen; St Lucia dari 106,28 persen menjadi 63,77 persen dengan rentang tarif dari 60 persen–78 persen; St Vincent dari 105,29 persen menjadi 63,18 persen dalam selang antara 60 persen–78 persen; dan Belize dari 101,80 persen menjadi 61,08 persen dalam selang 60 persen–66 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0 persen menjadi 57 persen untuk semua pos tarif (sebanyak 14) di jenjang ini.

India dengan jumlah pos tarif terbanyak, 249 pos di jenjang 4 mendapatkan penurunan tarif dari 165,66 persen menjadi 82,83 persen dalam rentang dari 75 persen–150 persen disusul oleh Nigeria dari 150 persen menjadi 75 persen yang sama untuk semua pos tarif sebanyak 217; Zimbabwe dari 150 persen menjadi 75 persen juga untuk seluruh pos tarif sebanyak 215; Korea Selatan dari 463,22 persen menjadi 231,61 persen dalam rentangan 72 persen–443,7 persen; Indonesia dari 164,55 persen menjadi 82,27 persen dalam rentang 75 persen–105 persen.

Dengan menerapkan jenjang dan rentang tarif serta skenario penurunan tarif yang diusulkan berbagai kelompok negara di atas, dapat disimpulkan bahwa usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi K 20 di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun K 33. Selain itu usulan Australia dan AS memberikan arah penurunan tarif yang berbeda antara jenjang 1 dan jenjang yang lain dimana pada jenjang 1 usulan Australia dan AS ini menyebabkan rata-rata tarif setelah penurunan di Indonesia lebih rendah dari pada di K 33, sedangkan di jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 rata-rata tarif Indonesia setelah diturunkan masih lebih tinggi daripada rata-rata tarif di K 33. Sedangkan usulan K 20 dan UE memberikan rata-rata tarif setelah penurunan di jenjang 1 lebih tinggi di Indonesia daripada di K 33 dan di jenjang 2, jenjang 3, dan jenjang 4 selalu lebih rendah daripada di K 33. Berhubung NB, terutama yang ada dalam K 33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan K 20. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut usulan K

20 ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga K 33 untuk disetujui. Kalau tidak, K 33 perlu mengkaji usulan penurunan tarif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ciri dan kerawanan sektor pertanian dan komoditas-komoditas pertanian andalannya di negara-negara anggota (Tabel 50). Jadi, penetapan penurunan tarif dan sasaran komoditasnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampaknya terhadap agribisnis komoditas, petani yang terlibat dan masyarakat secara luas.

Tabel 50. Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Jenjang Pos Tarif

Jenjang	K33			Indonesia		
	Selang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)		Selang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)	
		Lama	Baru		Lama	Baru
Jenjang 1						
K 20	0,0-22,5	19,0	14,2	6,8-20,3	24,1	18,1
UE	0,0-24,0	19,0	15,2	7,2-24,0	24,1	19,3
Australia/AS1	0,0-9,0	12,5	5,64	4,1-4,1	12,4	4,1
AS2	0,0-7,0	12,5	4,4	3,2-3,2	12,4	3,2
Jenjang 2						
K 20	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
UE	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
Australia/AS1	7,1-14,0	35,4	12,4	9,5-14,0	39,8	13,9
AS2	5,1-10,0	35,4	8,9	6,8-10,0	39,8	9,9
Jenjang 3						
K 20	52,7-84,5	103,9	67,6	61,8-61,8	95,0	61,8
UE	48,6-78,0	103,9	62,8	57,0-57,0	95,0	57,0
Australia/AS1	10,1-15,0	52,6	13,2	11,3-15,0	57,7	13,7
AS2	6,1-9,0	52,6	7,9	6,8-9,0	57,7	8,2
Jenjang 4						
K 20	78,2-532,4	186,9	112,1	150,0-210,0	164,6	98,7
UE	65,2-443,7	186,9	93,5	75,0-105,0	164,6	82,3
Australia/AS1	9,1-133,1	116,2	17,4	10,5-31,5	143,0	21,5
AS2	6,0-88,7	116,2	11,6	7,0-21,0	143,0	14,3

4.5. Analisis Simulasi dengan Model Keseimbangan Umum ATPSM

4.5.1. Dampak Resiprokal Berbagai Modalitas yang Diterapkan oleh Negara Pengekspor Utama ke Indonesia

Keikutsertaan Indonesia di dalam OPD selama kurun waktu 10 tahun telah memberi arti penting bagi peran Indonesia. Terbukti dengan ditetapkannya Indonesia sebagai koordinator kelompok negara 33/K 33 atau Group 33/G 33 yang terdiri dari negara-negara berkembang yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang,

khususnya menyangkut produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus. Isu tarif dalam akses pasar telah mendominasi setiap pertemuan baik di tingkat komisi pertanian maupun Konferensi Tingkat Menteri (KTM).

Untuk melihat dampak modalitas penurunan ke tiga pilar PP, maka dirumuskan 7 skenario penurunan, yaitu (1) NM menurunkan BD 75 persen, NB tetap; (2) NM menurunkan BD 53 persen, NB tetap; (3) NM menurunkan BD 60 persen, NB tetap; (4) NM menurunkan BD 100 persen, NB tetap; (5) NM dan NB menurunkan BD 75 persen dan 50 persen; (6) NM dan NB menurunkan BD 53 persen dan 35 persen; dan (7) NM dan NB menurunkan BD 60 persen dan 40 persen (lihat Bab Metodologi).

Hasil simulasi ATPSM atas ketujuh skenario tersebut kemudian dianalisa dampaknya terhadap distribusi kesejahteraan bagi mitra dagang Indonesia di negara maju dan negara berkembang secara agregat dan Indonesia sendiri serta terhadap harga dunia atas komoditas pertanian (Tabel 51).

Tabel 51. Dampak Beberapa Skenario terhadap Harga Dunia dan Distribusi Kesejahteraan (dalam juta AS\$)

Skenario	Kelompok Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total	Perubahan Harga Dunia (%)
NM menurunkan BD 75%, NB tetap	NM	32.088,54	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,92	1.836,71	2.043,38	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM menurunkan BD 53%, NB tetap	NM	32.146,38	- 39.770,48	10.478,71	69
	NB	495,32	1.791,48	2.049,98	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM menurunkan BD 60%, NB tetap	NM	32.127,98	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,23	1.805,87	2.0477,88	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	
NM menurunkan BD 100%, NB tetap	NM	15.440,04	- 46.893,04	8.826,74	68
	NB	16.029,85	- 9.043,06	5.137,30	
	Indonesia	- 495,43	444,73	- 47,92	
NM dan NB menurunkan BD 75% dan 50%	NM	32.088,53	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,89	- 2.322,16	2.313,88	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM dan NB menurunkan BD 53% dan 35%	NM	32.146,38	- 39.770,47	10.478,71	69
	NB	495,30	- 1.175,68	2.182,22	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM dan NB menurunkan BD 60% dan 40%	NM	32.127,97	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,21	- 1.563,85	2.220,76	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Secara umum hasil semua skenario tersebut mempunyai arah yang sama untuk NM, NB dan Indonesia. Dari besarnya dampak terhadap

distribusi kesejahteraan juga tidak banyak berbeda, meskipun pada beberapa skenario NB juga telah menurunkan BDnya.

Apabila NM melakukan liberalisasi dengan penurunan BD sebesar 75 persen atas produk eksportnya sedangkan negara berkembang tetap (penurunan tarif menurut Proposal Harbinson dan SE tidak diturunkan), berdampak positif bagi konsumen di negara maju dan negara berkembang, karena mereka menikmati peningkatan surplus sebesar 32 milyar dolar AS dan 447 juta dolar AS. Namun, bagi konsumen Indonesia kebijakan ini berdampak negatif karena surplusnya turun sebesar 442 juta dolar AS. Dari sisi produsen, kebijakan ini justru mendatangkan kerugian di negara maju, mereka harus kehilangan surplus sebesar 48,34 milyar dolar. Hasil ini menunjukkan bahwa sungguh sangat besar perlindungan dalam bentuk BD yang diberikan oleh NM kepada produsennya dan inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan pasar dan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Sebagai contoh, tahun 1999-2000 BD di negara Uni Eropa mencapai 87,89 milyar dolar AS. Di Indonesia, penurunan BD NM ini mendatangkan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan meningkatnya surplus sebesar 391 juta dolar AS. Kondisi ini dapat menjadi insentif bagi produsen/pengusaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang menjadi komoditas ekspor. Bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, liberalisasi ini mendatangkan kerugian sebesar 47 juta dolar AS.

Tidak berbeda dengan penurunan BD oleh negara maju sebesar 75 persen, liberalisasi penurunan BD sebesar 53 persen, 60 persen dan 100 persen memberikan dampak yang sama. Kesimpulannya juga sama apabila dilakukan kombinasi penurunan BD antara NM dan NB sesuai usulan K 20, AS, dan UE. Tampaknya, negara-negara berkembang harus terus berjuang menyerukan penurunan BD oleh negara maju agar tercipta keadilan bagi pelaku ekonomi di pasar global. Telah saatnya juga NM membuka pasar domestiknya dengan mengurangi bahkan menghapuskan sama sekali BDnya terutama dalam kotak jingga (*Amber box*) yang menjadi komponen utama di dalam model ATPSM.

Semua skenario alternatif kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama, yaitu sebesar 69 persen. Bila harga dunia naik, tentunya juga akan merugikan konsumen di negara pengimpor termasuk Indonesia yang juga masih sebagai pengimpor sebagian komoditas pertanian. Sebaliknya, produsen atau negara pengekspor sangat diuntungkan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangannya dengan meningkatkan jumlah dan mutu produksi dalam negeri, agar pada tingkat tertentu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia. Hasil simulasi ini juga seiring dengan studi yang menyimpulkan bahwa liberalisasi memberi dampak yang besar terhadap peningkatan harga dunia (Diao *et al.*, 2001 dalam Vanzetti).

4.5.2. Dampak Berbagai Modalitas terhadap Kinerja Ekspor, Impor, Produksi dan Konsumsi Komoditas Penting di Indonesia

Penelitian perdagangan internasional dengan model ATPSM untuk kasus Indonesia belum banyak dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh model ATPSM yang bersifat statis karena model ini tidak dapat menghitung keuntungan dan kerugian dalam distribusi kesejahteraan yang dinamik (kesejahteraan yang dihasilkan masih secara relatif). Di samping itu model ini juga belum memasukkan peubah pendapatan (*income*) yang dapat menjadi indikator agregat untuk mengukur manfaat ekonomi perubahan suatu kebijakan perdagangan. Tiga skenario yang dicoba dalam subbagian ini adalah: (1) Harbinson 1*, tanpa pemotongan SE dan BD; (2) Harbinson 2*, dengan pemotongan SE (NM = 80 persen; NB = 70 persen), BD (NM = 60 persen; NB = 20 persen); dan (3) Usulan K 20**.

Dampak terhadap Produksi Pertanian Indonesia

Dampak liberalisasi pemberlakuan atas tiga alternatif skenario seperti yang telah disebut di muka terhadap produksi komoditas pertanian ditampilkan pada Tabel 52.

Semua skenario memberikan dampak yang positif terhadap produksi pertanian Indonesia, meskipun simulasi skenario Harbinson 1 (tanpa penurunan terhadap BD dan SE) dan Usulan K 20 memberikan hasil yang sama baik arah dan besaran untuk semua komoditas. Perbedaan jenjang dan pemotongan tarif yang tidak besar antara NM dan NB tidak memberikan pengaruh yang nyata. Perubahan produksi akibat perubahan kebijakan perdagangan dengan skenario Harbinson 2 (dengan penurunan BD dan SE untuk negara maju dan negara berkembang) lebih besar dari Harbinson 1.

Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan yang nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk dan gula halus. Apabila penurunan tarif menurut Harbinson tanpa penurunan BD dan SE diberlakukan, akan terjadi kenaikan produksi tomat (2,30 persen), jeruk (2,09 persen), dan gula halus (2,16 persen), dan masing-masing sebesar 2,35 persen, 2,14 persen, dan 2,12 persen apabila penurunan tarif menurut Harbinson 2 disertai penurunan BD dan SE diterapkan. Kenaikan produksi ini disebabkan turunnya harga secara global akibat penurunan tarif bea masuk di NM dan NB sekaligus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan) serta komoditas karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.

Tabel 52. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Produksi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	0,42	0,53	0,42
Daging sapi	0,00	0,00	0,00
Daging kambing/domba	0,69	0,58	0,69
Daging babi	0,56	0,87	0,56
Unggas	0,70	0,83	0,70
Susu konsentrat	0,49	1,96	0,49
Gandum	0,00	0,00	0,00
Beras	0,51	0,58	0,51
Jagung	0,30	0,48	0,30
Kacang-kacangan	0,47	0,49	0,47
Tomat	2,30	2,35	2,30
Umbi-umbian	0,71	0,79	0,71
Apel	0,00	0,00	0,00
Jeruk	2,09	2,14	2,09
Pisang	1,36	1,48	1,36
Gula kasar	1,48	2,12	1,48
Gula halus	2,16	3,14	2,16
Biji kopi	0,05	0,08	0,05
Kopi bubuk	0,47	0,48	0,47
Biji coklat	0,03	0,05	0,03
Coklat halus	0,23	0,33	0,23
Teh	0,35	0,56	0,35
Daun tembakau	0,00	0,37	0,00
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,19	0,16	0,19
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,13	0,14	0,13

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Dampak terhadap Konsumsi Pertanian Indonesia

Di Indonesia, penerapan ketiga skenario liberalisasi perdagangan tidak menguntungkan bagi konsumen seperti ditunjukkan dengan perubahan yang bernilai negatif (Tabel 53). Penurunan yang tajam terjadi pada komoditas gandum (4,13%), susu konsentrat (2,61%), dan pisang (2,53%) pada skenario Harbinson 1 tanpa penurunan BD dan SE. Sedangkan bila disertai dengan penurunan BD sebesar 60 persen oleh NM dan 20 persen oleh NB serta penurunan SE 80 persen oleh NM dan 70 persen oleh NB (Harbinson 2), konsumsi atas beberapa komoditas akan menurun secara tajam, yaitu: susu konsentrat (10,62%), gandum (5,38%), dan teh (3,44%). Telah dikemukakan di muka, produksi pertanian akan meningkat dengan kedua kebijakan ini, sementara keadaan sebaliknya berlaku di sisi konsumsi. Semestinya penurunan tarif, bantuan domestik dan subsidi ekspor menyebabkan harga yang diterima konsumen menjadi lebih murah sehingga konsumsi juga meningkat. Namun berbeda kondisinya untuk barang impor, dengan penurunan bantuan domestik dan subsidi ekspor oleh negara maju, menyebabkan harga produsen menjadi lebih mahal yang akhirnya mempengaruhi harga impor bagi negara pengimpor barang yang bersangkutan. Hal inilah mungkin menjadi suatu kelemahan dari model ATPSM. Di dalam model ini tidak dirinci

secara jelas apakah Indonesia sebagai pengeksport atau pengimpor karena simulasi dilakukan bagi agregat komoditas pertanian dan mitra dagangnya juga bersifat agregat, NM dan NB. Untuk melihat dampak secara rinci, pada penelitian yang akan datang perlu mencermati komoditas khusus dan mitra dagang khusus serta bentuk perjanjian (skema penurunan tarif, BD dan SE) yang telah disepakati.

Tabel 53. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Konsumsi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,08	-0,09	-0,08
Daging sapi	-0,92	-2,51	-0,92
Daging kambing/domba	-1,76	-1,44	-1,76
Daging babi	-0,99	-1,46	-0,99
Unggas	-1,51	-1,77	-1,51
Susu konsentrat	-2,61	-10,62	-2,61
Gandum	-4,13	-5,38	-4,13
Beras	-0,54	-0,69	-0,54
Jagung	-0,42	-0,67	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-0,40	-0,39
Tomat	-1,00	-1,02	-1,00
Umbi-umbian	-1,19	-1,31	-1,19
Apel	-2,19	-2,38	-2,19
Jeruk	-0,88	-0,90	-0,88
Pisang	-2,53	-2,75	-2,53
Gula kasar	-1,16	-1,66	-1,16
Gula halus	-2,17	-3,14	-2,17
Biji kopi	-0,02	-0,08	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-0,27	-0,37
Biji coklat	-0,02	-0,03	-0,02
Coklat halus	0,00	0,00	0,00
Teh	-1,99	-3,44	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-0,93	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	-1,10	-1,09	-1,10
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-0,67	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Dampak terhadap Ekspor Pertanian Indonesia

Pemberlakuan kebijakan perdagangan atas ketiga skenario tersebut efektif bagi kinerja ekspor Indonesia karena mendatangkan dampak yang positif dengan peningkatan volume ekspor yang sangat tajam, terutama pada skenario Harbinson 1. Penurunan tarif di negara maju dan negara berkembang tanpa disertai penurunan BD dan SE saja telah mendorong volume ekspor Indonesia. Bila Indonesia ingin melindungi petani produsen dalam negeri, tampaknya harus lebih giat untuk memperjuangkan penurunan tarif di berbagai fora OPD.

Hasil simulasi liberalisasi perdagangan memperlihatkan ekspor pertanian Indonesia melebihi 100 persen, bahkan ada yang mencapai ribuan persen. Volume ekspor daging babi meningkat tajam sebesar 202 ribu persen (Tabel 54). Hal ini dapat dipahami, mengingat daging babi ini juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki pangsa yang besar. Komoditas lain yang mengalami peningkatan dalam volume ekspornya adalah pisang (59.000 %), daging kambing/domba (31.000%), gula halus (6.000%), gula kasar (4.000 %), dan jeruk (1.500%). Analisa *trend* ekspor Indonesia selama 10 tahun dari 1993–2003 juga memperlihatkan bahwa pisang segar juga adalah komoditas utama ekspor Indonesia, oleh karena itu perhatian khusus terhadap komoditas ini sangat diperlukan terutama di dalam upaya peningkatan mutu. Temuan lainnya adalah ternyata kebijakan ini kurang efektif bagi komoditas perkebunan kita, yaitu coklat, teh, dan tembakau, bahkan untuk komoditas karet tidak berpengaruh sama sekali yang ditunjukkan oleh perubahan ekspor yang bernilai nol.

Tabel 54. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Ekspor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	670,11	0,53	670,11
Daging sapi	92,00	0,91	92,00
Daging kambing/domba	31.593	18.340	31.593
Daging babi	201.916	299.176	201.916
Unggas	1.230	1.380	1.230
Susu konsentrat	2,86	1,96	2,86
Gandum	756,44	0,00	756,44
Beras	539,17	0,58	539,17
Jagung	388,87	0,48	388,87
Kacang-kacangan	31,99	0,49	31,99
Tomat	1.355	1.058	1.355
Umbi-umbian	14,24	6,05	14,24
Apel	595,38	0,00	595,38
Jeruk	1.543	2,14	1.543
Pisang	59.025	64.143	59.025
Gula kasar	4.857	6.935	4.857
Gula halus	6.409	3,14	6.409
Biji kopi	0,08	0,08	0,08
Kopi bubuk	3,10	0,48	3,10
Biji coklat	0,04	0,05	0,04
Coklat halus	0,30	0,33	0,30
Teh	2,92	0,56	2,92
Daun tembakau	3,52	0,37	3,52
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	53,49	0,16	53,49
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,83	0,38	0,83

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hasil simulasi skenario Harbinson 1 dan Usulan K 20 adalah sama, simulasi ini skenario

Harbinson 2 memberikan hasil yang lebih besar namun arah dan jenis komoditas yang terbesar adalah sama. Oleh karena itu pilihan akan salah satu kebijakan ini akan sangat efektif untuk kinerja ekspor Indonesia dan secara keseluruhan informasi ini juga sangat bermanfaat bagi kita bila perhitungan di dalam model ATPSM bersifat dinamis sehingga dapat memutuskan kebijakan secara konsisten.

Dampak terhadap Impor Pertanian Indonesia

Berbeda dengan kinerja ekspor, semua skenario liberalisasi perdagangan menyebabkan turunnya impor Indonesia (Tabel 55). Di satu sisi volume ekspor kita meningkat tajam dan disisi lain impor kita juga menurun. Tentunya kondisi ini yang kita inginkan karena kenaikan volume ekspor kita disertai juga dengan menurunnya impor sehingga akan mengurangi ketergantungan kita terhadap suplai dunia yang akhirnya dapat menghemat devisa kita.

Tabel 55. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Impor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,07	-8,06	-0,07
Daging sapi	0,00	-2,48	0,00
Daging kambing/domba	-1,76	-100,00	-1,76
Daging babi	-0,99	-100,00	-0,99
Unggas	-1,51	-100,00	-1,51
Susu konsentrat	0,00	-4,63	0,00
Gandum	0,00	-5,35	0,00
Beras	-0,54	-60,55	-0,54
Jagung	-0,42	44,07	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-8,58	-0,39
Tomat	-1,19	-100,00	-1,19
Umbi-umbian	-1,00	-100,00	-1,00
Apel	0,00	-2,37	0,00
Jeruk	-0,18	-21,01	-0,18
Pisang	-2,53	-100,00	-2,53
Gula kasar	0,80	-100,00	0,80
Gula halus	-2,17	-13,64	-2,17
Biji kopi	-0,02	-6,02	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-21,93	-0,37
Biji coklat	-0,22	-0,31	-0,22
Coklat halus	0,00	-0,80	0,00
Teh	-1,99	-16,00	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-3,77	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,06	-45,59	0,06
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-100,00	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Dampak yang besar diperoleh bila liberalisasi dengan skenario Harbinson 2 diterapkan, artinya disamping melakukan penurunan tarif juga menurunkan BD dan SE. Hasil simulasi memperlihatkan penurunan volume impor Indonesia untuk beberapa komoditas penting menurun drastis sampai 100 persen terutama komoditas peternakan yang terdiri dari daging kambing/domba, daging babi dan unggas; buah-buahan meliputi tomat, umbi-umbian dan pisang, gula halus dan minyak nabati. Informasi ini sangat berguna bagi industri gula di dalam negeri karena kebijakan ini dapat memperbaiki kinerja pergulaan nasional kita dengan tidak ada impor gula sama sekali. Jelaslah bahwa bantuan domestik oleh negara maju dan negara berkembang terhadap industri gulanya cukup tinggi.

Penurunan impor terhadap komoditas beras juga sangat berarti (60,55%) bagi Indonesia dengan penerapan kebijakan Harbinson 2. Penurunan tarif yang tidak disertai dengan penurunan BD dan SE seperti yang diusulkan oleh Harbinson 1 dan K 20 tidak memberi arti penting bagi perberasan nasional kita. Itulah sebabnya komoditas gula dan beras termasuk yang sangat dilindungi dan masuk dalam daftar sensitif tinggi di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia yang jadwal penurunan tarifnya ditunda sampai tahun 2010 dan ditentukan secara spesifik.

Dampak terhadap Distribusi Kesejahteraan

Di dalam model ATPSM kesejahteraan total dihitung berdasarkan penjumlahan dari surplus produsen, surplus konsumen dan penerimaan pemerintah. Anak bagian bab ini menjelaskan ringkasan dari dampak semua skenario alternatif kebijakan yang telah dikemukakan di muka menyangkut surplus produsen dan surplus konsumen terhadap tiga kelompok negara (NM, NB, dan Indonesia).

Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberikan keuntungan bagi NM, melalui peningkatan kesejahteraan total terutama skenario Harbinson 2. Sebaliknya negara berkembang dirugikan. Penurunan tarif bea masuk akan menurunkan surplus produsen negara yang mengenakan tarif, sebaliknya konsumen mendapatkan keuntungan melalui peningkatan surplusnya dan kerugian produsen ini dapat diimbangi keuntungan konsumen. Hal ini akan dialami NM, mengingat tingginya tarif bea masuk komoditas pertanian yang mereka terapkan selama ini. Melalui mekanisme internal pendistribusian pendapatan di NM dengan sistem fiskal dan moneter yang efektif, sesungguhnya kerugian produsen hampir pasti akan mereka atasi kalau saja liberalisasi perdagangan mereka lakukan secara konsekuen. Namun, bagi petani produsen di negara berkembang termasuk Indonesia, liberalisasi ini membawa keuntungan (Tabel 56), seperti ditunjukkan oleh perubahan surplus yang bernilai positif, tetapi secara total seluruh skenario kebijakan liberalisasi ini berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apabila mekanisme internal pendistribusian pendapatan belum efektif sebagaimana umumnya terjadi di NB, kesenjangan manfaat ini akan

menimbulkan dampak sosial. Hal inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan liberalisasi perdagangan pertanian ditolak berbagai pihak. Jadi, dapatlah dikatakan liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan NM dibanding NB. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi NM dan NB maka semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu Indonesia bersama-sama dengan anggota K 33 harus berupaya mempengaruhi NM agar melakukan reformasi kebijakan perdagangan mereka, antara lain melalui partisipasi aktif dalam setiap forum perundingan pertanian.

Tabel 56. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perubahan Kesejahteraan (dalam Juta AS\$)*

Skenario	Perubahan Kesejahteraan	Negara Maju	Negara Berkembang	Indonesia
Harbinson 1	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.654,73	1.774,98	-47,03
Harbinson 2	Surplus Konsumen	40.583,99	-8.761,84	-557,55
	Surplus Produsen	-50.806,25	8.419,94	469,34
	Kesejahteraan Total	16.188,19	1.087,89	-100,35
Usulan Kelompok 20	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.645,73	1.775,98	-47,03

Sumber: Simulasi ATPSM Versi 3.

Tabel 41. Pemilihan PK dengan 5 Indikator

Komoditas/Produk Olahan	HS 2 s.d. 4 Digit	NI atau NE1 ¹⁾	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Produk Khusus
			thd GDP Pert. (%) ²⁾	thd Total Kalori (%) ²⁾	thd Total Protein (%) ²⁾	thd TK Pert. (%) ²⁾	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P a d i dan beras	1006	NI	28,8	51,6	44,59	28,79	*
J a g u n g dan pakan ternak	1108	NI	5,51	1,39	1,28	5,92	*
K e d e l e dan olahannya	1201	NI	3,55	2,8	9,66	2,49	*
Sayur-sayuran	07 & 20	NI	7,23	1,74	4,32	13,92	*
Buah-buahan	08	NI	12,18	0,28	0,82	12,25	*
T e b u dan gula	1701	NI	2,72	5,58	0,16	2,35	*
T e m b a k a u dan tembakau olahan	2403	NI	12,52	0,00	0,00	1,63	*
Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar dan daging/jeroan sejenisnya dan daging olahan/awetan	02	NI	5,24	0,38	2,29	3,99	*
Unggas dan hasil-hasilnya	0105, 0407 & 0408	NE&NI	9,67	2,46	6,06	3,67	*
Minyak hewani dan minyak nabati	15	NI	5,57	0	0,01	0,48	*
Makanan lainnya dan minman beralkohol	2208	NI(?)	6,25	1,12	1,93	0,34	*
Kapuk bersih dan benang	5203 & 5206	NI	21,41	0	0	0,78	*
Ketela pohon	0714	NE	2,65	1,95	0,41	2,13	
Ubi jalar dan umbi2 lainnya	0714 & 0601	NE	5,31	0,69	0,37	6,43	
Kacang tanah	1202	NI	1,74	0,41	0,92	2,62	
Kacang-kacangan lainnya	1207	NE	0,51	0,44	0,45	0,71	
Padi-padian dan bahan makanan lainnya	1008	NI	0,05	0,02	0,01	0,42	
K a r e t	40	NE	4,91	0	0	1,28	
K e l a p a dan kopra	1503 & 1203	NE	14,35	7,11	1,04	1,75	
Kelapa sawit	1511	NE	2,05	5,59	0,00	1,52	
Hasil tanaman serat		NE(?)	0,17	0	0	0,09	
K o p i, kopi giling dan kupasan	0901	NE	1,40	0,67	1,21	1,89	
T e h dan the olahan	0902	NE	2,37	0,15	0,81	0,76	
C e n g k e h	0907	NE	0,76	0,00	0,00	0,68	

Tabel 41. Lanjutan

Komoditas/Produk Olahan	HS 2 s.d. 4 Digit	NI atau NE1 ¹⁾	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Produk Khusus
			thd GDP Pert. (%) ²⁾	thd Total Kalori (%) ²⁾	thd Total Protein (%) ²⁾	thd TK Pert. (%) ²⁾	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K a k a o, coklat dan kembang gula	18	NE	3,32	0,02	0,02	0,35	
Jambu mete	0801	NE	1,13	0,29	0,62	0,21	
Hasil perkebunan lainnya		NE	1,05	0,66	0,67	0,10	
Hasil pertanian lainnya		?	0,35	0,16	0,00	0,13	
Susu segar	0401	NI	0,30	0,03	0,08	0,18	
Hasil pemeliharaan hewan lainnya	0410	?	0,09	0,00	0,02	0,07	
Makanan dan minuman terbuat dari susu	0402, 0403, 0404, 0405, 0406	NI	0,66	0,97	1,29	0,27	
Buah-buahan dan sayur-sayuran olahan dan awetan	0812,0814, 2002,2004, 2005	NI	1,92	0,28	0,35	0,14	
Tepung terigu	1101	NI	0,75	0,52	0,51	0,12	
Tepung lainnya	1105	NE(?)	1,68	0,02	0,71	0,06	
Roti, biskuit dan sejenisnya	19	NE	1,71	4,53	3,26	0,36	
Mie, makaroni dan sejenisnya			1,13	2,84	2,4	0,25	
Biji-bijian kupasan	1104	NI	1,2	0	0	0,05	
	Jumlah		12	4	3	5	12

Keterangan:

1) NI = Net impor, NE = Net ekspor, untuk yang tidak jelas posisinya dibuat tanda tanya (?), deskripsi produk/komoditas sesuai dengan Buku Tarif 2004.

2) Nilainya > 5%

V. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Perdagangan Bilateral dan Regional

Negara tujuan ekspor Indonesia didominasi oleh Singapura dan Malaysia untuk kawasan ASEAN dan negara China dan Jepang di luar ASEAN. Jenis produk/komoditas yang diekspor ke kawasan ASEAN lebih banyak berbentuk primer, yang terbesar adalah babi hidup, sedangkan ke luar ASEAN berbentuk primer dan olahan, yaitu minyak kelapa (termasuk minyak kopra). Perdagangan dengan Singapura dan Malaysia, serta dengan Jepang dan China memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan potensi dan peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi kelapa dalam negeri (dari hulu hingga hilir), sehingga ekspor minyak kelapa ke China juga meningkat di masa mendatang. Namun, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan harga di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan bilateral Indonesia dan China yang akan mempengaruhi daya saing minyak kelapa domestik. Oleh karena itu, kekonsistenan kebijakan sangat diperlukan di dalam merumuskan pola perdagangan bilateral di kawasan ASEAN dan di luar ASEAN.

Perdagangan bilateral Indonesia-China, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea Selatan yang dilatarbelakangi ciri makroekonomi yang berbeda telah menunjukkan adanya kesenjangan teknologi dan daur produk. Kesenjangan teknologi tercermin dari adanya produk ekspor Indonesia ke China, Jepang, dan Korea Selatan berupa produk mentah/primer, dan diimpor kembali oleh Indonesia dalam bentuk semi-olahan, dan olahan. Produk yang mengalami defisit perdagangan dengan China didominasi oleh produk primer dan dua produk olahan, berasal dari hasil peternakan (HS 0502 dan 4104), hortikultura (HS 0703, 0805, dan 0808), tanaman pangan (HS 1001, 1005, 1006, 1201, dan 1202), serta perkebunan (HS 2401). Sementara produk olahan berupa kelompok produk tanaman pangan (HS 1101), produk perkebunan (HS 1702, 4011, dan 4012). Kelompok surplus juga terdiri dari produk primer dan olahan, yaitu meliputi produk hortikultura (HS 0803), produk peternakan (HS 4106), produk perkebunan (HS 1801 dan 4001). Produk HS 4002 merupakan produk industri sebagai substitusi perkebunan juga mengalami surplus. Produk olahan yang mengalami surplus antara lain adalah produk tanaman pangan (HS 1507) yang berbahan baku yang diimpor dari China, produk perkebunan (HS 1511, 1513, 1520, dan 2905). Kelompok produk bukan-pertanian yang berpotensi pasar cukup baik di China antara lain produk perikanan (HS 0306), produk industri (HS 2915, 2917, dan 3204), dan produk kehutanan (HS 4407).

Secara umum perdagangan Indonesia dengan China dalam kondisi surplus dan program EHP bilateral Indonesia-China mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari pengekspor dunia di pasar China. Namun,

Indonesia harus meningkatkan daya saing produknya karena pemerintah telah menyepakati EHP bilateral dengan China untuk menurunkan tarif impor. Selain itu Indonesia juga perlu mewaspadasi terjadinya ketergantungan industri olahan dalam negeri terhadap bahan baku yang berasal dari China, misalnya minyak kacang kedelai yang tercermin dari kinerja perdagangannya menurun drastis.

Impor jagung dari China untuk industri pakan juga cenderung meningkat, sehingga dapat menimbulkan kerentanan sektor peternakan domestik terhadap pasokan bahan baku pakan dari China. Hal serupa juga ditunjukkan oleh impor kacang kedelai dan kacang tanah. Ketergantungan Indonesia baik dengan China maupun pengeksportir bahan baku pangan dan pakan lainnya dapat menimbulkan dampak ikutan yang lebih besar, melibatkan banyak sektor dan menyebabkan ketahanan ekonomi industri olahan dan ketahanan pangan di dalam negeri menjadi rentan pula terhadap gejolak ekonomi dunia.

Khusus untuk komoditas biji kakao yang mengalami penurunan nilai ekspor akibat perbedaan perlakuan oleh Malaysia yang mengeksportir kembali olahan biji kakao kepada negara pengimpor yang selama ini menjadi pasar ekspor kita (bahan bakunya berasal dari Indonesia) perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan dengan memasukkan biji kakao dalam agenda *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN maupun EHP ASEAN dengan China.

Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan tingkat swasembada pangan dan bahan baku industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dan kerentanan industri hilir domestik terhadap fluktuasi ekonomi negara partner dan ekonomi dunia. Sehubungan dengan potensi produk yang berpangsa besar di China dan telah disertakan dalam EHP diperlukan peningkatan daya saing agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa ekspor di China khususnya, dan pasar internasional pada umumnya. Sementara untuk produk yang berpotensi pasar, namun belum disertakan dalam EHP, mendesak untuk diagendakan dalam EHP agar tidak mengalami diskriminasi lebih lanjut dibandingkan eksportir pesaing lainnya. Meskipun hanya terdapat satu produk yang disertakan dalam EHP bilateral Indonesia-China (minyak kelapa/kopra dan kernel kelapa sawit), maka diperlukan peningkatan daya saing dengan mengembangkan industri olahan dan produk turunannya. Produk yang tidak disertakan dalam EHP bilateral Indonesia-China, namun kinerja perdagangannya baik adalah biji kakao, sehingga mendesak dimasukkan dalam program tersebut, sehingga tidak terus mengalami diskriminasi dengan produk yang sama dari pesaing lain.

Produk pertanian Indonesia yang mengalami defisit perdagangan dengan Jepang adalah kelompok produk primer berupa produk pertanian (HS 0910, 0904, dan 1005), produk perkebunan (HS 1511, 1703, dan 4002), produk perikanan (HS 0303, 0305 dan 0306), sementara produk olahan berupa produk perkebunan dan tanaman pangan (HS 0901, dan

1902). Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, yaitu produk primer tanaman pangan (HS 0704, 0709, 0714, 0902, dan 1006) dan produk perkebunan (HS 4001), produk samping dari pengolahan tanaman pangan (HS 1806 dan 2008), produk perikanan (HS 1604), dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905, dan 2207).

Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 2301), produk kehutanan (HS 4401, 4407, 4409 4413, 4415, 4418, 4420, dan 4421), serta produk industri kimia primer (HS 2207, 2902, 2905, dan 2922), dan produk industri kimia olahan (HS 3101, 3102, 3204, 3401, 3402, dan 3505). Sementara produk impor yang cukup besar volume dan nilainya dari Jepang adalah produk tanaman pangan (HS 1006, 0910), produk olahan dari pertanian (HS 1702, dan 1902), produk kimia (HS 2905, 2929, dan 3204) dan pengolahan industri kimia yaitu pupuk.

Peningkatan pendapatan nasional perkapita Jepang juga meningkatkan daya beli domestik akan produk-produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari segi peluang, Indonesia perlu memanfaatkan kerjasama perekonomian melalui Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA* yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara pada Juli 2005. Kebijakan dalam negeri yang diperlukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan terpadu guna meningkatkan efisiensi pengolahan produk pertanian dan nilai tambah domestik. Selain itu untuk menghadapi perdagangan bebas melalui KPE yang akan dimulai pada tahun 2007 Indonesia perlu menghasilkan inovasi produk olahan seperti produk ubi kayu yang memiliki pasar yang potensial tidak hanya dapat diolah untuk tepung kasava, akan tetapi dapat bahan untuk farmasi sehingga menaikkan nilai jualnya.

Melalui ASEAN+3 kerjasama bilateral Indonesia-Jepang perlu dimanfaatkan sehingga tidak terjadi kesenjangan teknologi dan membuka pasar domestik masing-masing secara adil dan berkesinambungan. Industri dalam negeri juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan melakukan integrasi dari hulu sampai hilir, sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap industri Jepang. Selain itu ragam kelompok komoditas yang diperdagangkan juga perlu dikembangkan dengan membuka kemudahan dalam hal penurunan tarif, fleksibilitas spesifikasi kualitas produk yang diperdagangkan, karena Jepang sangat ketat dalam menentukan mutu produk pertanian. Investasi Jepang untuk industri pengolahan produk pertanian primer di Indonesia juga sebaiknya ditingkatkan.

Kelompok produk yang mengalami defisit perdagangan dengan Korea Selatan berupa produk primer maupun olahan, yaitu produk primer peternakan (HS 4104), sementara produk olahan berupa produk perkebunan (HS 1701, 4002, 4005, dan 4010). Selain itu terdapat defisit produk olahan yang berasal dari semua sektor baik tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, maupun peternakan yang tergolong dalam HS 2106. Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, seperti produk tanaman pangan (HS 0714) dan produk perkebunan (HS 0901 dan 4001). Produk olahan berupa produk utama olahan perkebunan (yaitu HS 1513), produk samping dari pengolahan tanaman pangan dan perkebunan (yaitu HS 1703, 2302, dan 2306), dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905).

Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 0303), produk kehutanan (HS 4402, 4407, 4409, 4411, 4412, 4413, dan 4418), serta produk industri kimia. Sementara produk impor yang cukup nyata besaran volume dan nilainya dari Korea Selatan adalah produk bahan galian, yaitu semen.

Kebijakan dalam negeri yang diperlukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan terpadu guna meningkatkan efisiensi pengolahan produk pertanian dan nilai tambah domestik. Selain itu untuk menghadapi era perdagangan bebas Indonesia-Korea Selatan pada awal bulan Juli 2006 mendatang, diperlukan iklim upaya yang kondusif bagi industri domestik agar dapat mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, ubi kayu akan mengalami peningkatan nilai tambah yang maksimal apabila tidak hanya diolah menjadi tepung kasava, namun lebih jauh diproses sebagai bahan baku bioetanol yang merupakan bahan baku industri farmasi yang bernilai tinggi, sehingga nilai jualnya lebih tinggi.

Namun, pemberlakuan skema penurunan tarif di ASEAN yang mensyaratkan tarif menjadi nol persen tahun 2005 melalui Kawasan Perdagangan Bebas/KPB atau *Free Trade Area/FTA*, menyebabkan dampak berbeda terhadap produsen komoditas dan konsumen di dalam negeri. Kesepakatan ini diprakirakan akan menyebabkan produsen/petani Indonesia mengalami kehilangan surplusnya yang dicerminkan oleh penurunan produksi akibat anjloknya harga ekspor, khususnya atas komoditas kelapa dan minyak kelapa, cerutu, biji kakao, dan jagung. Lebih lanjut diperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN hanya memberikan keuntungan kepada konsumen di dalam negeri. Jadi, apabila pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan produsen/petani sebaiknya tidak perlu terlalu berambisi melaksanakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN.

Perdagangan bebas ASEAN dalam skema AFTA dengan tiga negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan) yang disebut dengan AFTA+3 diprakirakan tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Indonesia, karena nilai surplus produsen, konsumen dan penerimaan pemerintah adalah sama. Oleh karena itu, kebijakan ini kurang efektif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Liberalisasi ini hanya menguntungkan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea

Selatan dan tidak berarti sama sekali kepada negara Laos, Thailand, dan Myanmar. Namun, KPB antara ASEAN termasuk Indonesia dengan Jepang secara bersama-sama berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat baik di negara pengekspor (Indonesia) maupun pengimpor (Jepang). Demikian juga penerapan KPB ASEAN (termasuk Indonesia) dengan China dan dengan Korea Selatan. Penghapusan tarif (semula lima persen menjadi nol persen) memang menyebabkan harga ekspor menjadi lebih murah, sehingga surplus produsen juga berkurang di satu pihak, dan di pihak lain konsumen domestik diuntungkan melalui peningkatan surplusnya. Peningkatan surplus konsumen jauh lebih besar dari pada penurunan surplus produsen baik di negara pengekspor maupun di negara impor. Tampaknya kebijakan ini dapat menjadi alternatif bagi pengambil kebijakan di Indonesia yang harus diiringi oleh peningkatan mutu komoditas ekspor Indonesia sehingga dapat menutupi kehilangan surplus tersebut, terutama KPB dengan Korea Selatan yang masih dalam tahap perencanaan.

Perdagangan produk pertanian Indonesia baik di kawasan maupun di luar kawasan ASEAN tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dan faktor pendorong ekspor pertanian Indonesia saat ini masih didominasi oleh populasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

Dengan berlakunya kesepakatan AFTA nilai ekspor produk pertanian Indonesia lebih rendah dari sebelum adanya kesepakatan itu tetapi nilai ekspor sejak AFTA khusus di kawasan ASEAN meningkat dibandingkan dari waktu sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN menyebabkan nilai ekspor pertanian Indonesia menurun. Di luar ASEAN, ekspor produk pertanian ke China dan Jepang meningkat setelah berlangsungnya AFTA, dan dari peningkatan pendapatan di wilayah ini Jepang menunjukkan prospek yang baik dalam peningkatan impor, sementara China dan Korea Selatan tidak potensial. Sebaliknya dari pertumbuhan populasi, China, dan Korea Selatan menunjukkan prospek pasar ekspor yang baik, sementara Jepang sebaliknya.

Penentuan komoditas pertanian yang sebaiknya diikutsertakan dalam skema penurunan tarif atau dalam EHP sebaiknya dikaji secara mendalam, mengingat perbedaan dampak yang ditimbulkan antara satu komoditas dengan komoditas lain. KPB Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan bagi komoditas tertentu seperti minyak kelapa yang juga diatur dalam skema EHP, langsung berdampak terhadap turunnya harga ekspor yang mengakibatkan penurunan volume ekspor Indonesia akibat anjloknya produksi dalam negeri. Di dalam negeri, konsumen diuntungkan dengan turunnya harga beli. Sebaliknya berlaku bagi komoditas minyak kedelai, penghapusan tarif bea masuk justru menyebabkan kenaikan harga baik di tingkat konsumen maupun produsen, sehingga produksi di dalam negeri meningkat. Namun, keseluruhan KPB ini tidak banyak mempengaruhi kinerja produksi minyak kedelai di dalam negeri. Selanjutnya, khusus untuk kopi KPB

Indonesia masing-masing dengan Jepang dan Korea Selatan juga tidak efektif dalam peningkatan harga produsen dan volume ekspor. Berhubung KPB ini masih dalam tahap peninjauan, maka disarankan pengambil kebijakan sebaiknya mengkajinya secara hati-hati dan tidak perlu terburu-buru merealisasikannya.

Apabila kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA* diberlakukan khususnya terhadap komoditas kopi olahan akan berdampak pada penurunan produksi dalam negeri akibat turunnya harga, sehingga insentif produsen/petani juga tidak ada, demikian juga halnya terhadap komoditas ubi kayu dan minyak kelapa. Sama halnya dengan KPB Indonesia dengan Jepang, KPE ini juga tidak memberikan dampak yang positif bagi kinerja sektor pertanian Indonesia. Pengamatan dan tinjau ulang terhadap kebijakan KPB ini perlu dilakukan, mengingat potensi dampak negatif yang ditimbulkannya terutama terhadap penurunan volume ekspor minyak kelapa yang sangat drastis.

Indonesia perlu memelihara kekonsistenan pasokan komoditas ke negara mitra dagangnya di ASEAN+3 tersebut, melalui kebijakan perdagangan dan ekonomi yang konsisten pula. Apabila hal ini terganggu, prospek ekspor pertanian akan terganggu pula. Semua pemangku kepentingan pada komoditas ini harus sepakat menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan masyarakat dalam negeri.

5.2. Perdagangan Multilateral

Nilai Kotak Hijau/KH atau *Green Box* pertanian Indonesia tahun 2001 hingga 2003 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya Bantuan Domestik pertanian Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan senilai Rp. 9,08 Trilyun pada tahun 2004 (setara dengan AS \$ 1.016,91 Juta). Data ini menunjukkan bahwa jika pada 2001–2003 nilai KH terus menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Proses penyaringan Produk Khusus/PK atau *Special Products/SP* sebaiknya dilakukan secara luwes dan diserahkan pada masing-masing anggota dengan ketersediaan data yang dimilikinya. Namun, indikator yang telah dipilih oleh suatu negara harus dipakai secara konsisten sepanjang waktu sampai ada kesepakatan yang baru.

Dengan menggabungkan lima indikator bagi komoditas, yaitu sebagai *net import*, **sumbangannya** terhadap PDB pertanian, kalori, protein, dan tenaga kerja, penelitian ini menetapkan bahwa terdapat 12 produk/komoditas yang berhak mendapatkan PK. Komoditas pertanian ini adalah: beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, gula, tembakau, daging ternak besar, unggas, minyak hewani/nabati, makanan lainnya/minuman beralkohol, dan kapuk/benang. Namun, dengan

melakukan pemilihan secara bertahap dengan keterbatasan data dan indikator yang ada, Indonesia sebaiknya mengusulkan Produk Khusus/PK pertaniannya sebanyak duapuluh komoditas, yaitu: Padi; Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Cabe; Tomat; Kentang; Pisang; Jeruk; Sayuran dan Buah-buahan lainnya; Kelapa dan Kelapa sawit; Kopi; Cengkeh; Tanaman Rempah dan Obat; Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat; Tanaman Pertanian Lainnya; Ternak Kecuali Susu Segar; Susu Segar; Unggas dan hasil-hasilnya.

Penggunaan indikator yang berbeda dan *threshold* yang berbeda akan diperoleh ratusan kombinasi komoditas yang potensial dimasukkan sebagai PK. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kombinasi komoditas pertanian yang sesuai dengan harapan petani dan masyarakat pada umumnya, dimana komoditas ini nantinya mendapat perhatian lebih dalam program pengembangannya di dalam negeri, semua pihak pemangku kepentingan perlu menetapkan suatu kesepakatan dalam pemilihan indikator dan *threshold* tersebut.

Dari 44 negara anggota K 33, tercatat sejumlah 16.540 pos tarif yang ada dengan kisaran dari 0 persen sampai dengan 887,4 persen dan dengan rata-rata 63,96 persen. Lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia (1.341 pos tarif), Korea Selatan (1.239 pos), China (977 pos), Guatemala (812 pos), dan El Salvador (764 pos).

Lima kelompok komoditas yang memiliki pos tarif terbanyak adalah Kelompok 15 (Lemak dan Minyak Hewani dan Nabati dan berbagai Produknya dengan 1.426 pos, disusul Kelompok 7 (Sayuran yang Dapat Dimakan dan Beberapa Jenis Umbi-umbian), 1.188 pos; Kelompok 12 (Biji-bijian dan Buah-buahan yang Mengandung Minyak dan Tanaman Obat-obatan, 1.096 pos; Kelompok 8 (Buah-buahan dan Kacang-kacangan yang Dapat Dimakan dan Kulit Buah Sitrus dan Melon), 1.077 pos; dan Kelompok 20 (Olahan Sayuran, Buah-buahan, Kacang-kacangan atau Bagian dari Tanaman), 1.010 pos.

Dengan menggunakan usulan K 20 sebagai penentu banyaknya jenjang dan rentang tarif, di jenjang 1, China memiliki pos tarif yang terbanyak dibanding negara-negara lain anggota K 33 dengan jumlah 855 pos (17,5%) dari jumlah tarif di jenjang termaksud) dengan rata-rata 15,3 persen; Indonesia di jenjang 2 dengan jumlah 1,250 pos (21,8%) dengan rata-rata 42,8 persen; Pakistan di jenjang 3 dengan 671 pos (14,0%) dengan rata-rata 100,00 persen; dan India di jenjang 4 dengan 249 pos (22,5%) dengan rata-rata 165,7 persen.

Khusus di Indonesia, lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di jenjang 1 adalah komoditas 13 (lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya) dan 23 (residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) dengan rata-rata sebesar 30 persen dan masing-masing hanya 1 pos tarif; komoditas 10 (sereal), 35 (zat albumina; pati dimodifikasi; enzim) dan 52 (kapas) dengan rata-rata sebesar 27 persen dan jumlah pos tarif berturut-turut 5, 3 dan 1.

Usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi K-20 di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun K-33. Berhubung NB, terutama yang ada dalam K-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan K-20. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut usulan K-20 ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga K-33 untuk disetujui. Kalau tidak K-33 perlu mengkaji secara saksama modalitas ini untuk mendapatkan suatu usulan yang lebih tepat mewakili K-33.

Dari semua skenario yang telah dibuat diketahui bahwa liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan bagi NM. Rumus penurunan tarif yang diusulkan oleh kelompok negara 20/K-20 atau G-20 yang notabene anggotanya adalah NB atau negara berkembang yang telah lebih maju, juga berpihak kepada NM dan bukan untuk NB.

Perlindungan yang diberikan NM dalam bentuk Bantuan Domestik (BD) kepada produsennya sangat besar nilainya dan inilah yang menjadi penyebab ketidakadilan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Penurunan tarif yang disertai penurunan BD hanya oleh negara maju dengan tidak mengubah Subsidi Ekspor/SEnya, menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak memberi dampak nyata bagi Indonesia. Penurunan BD domestik oleh negara maju hanya menguntungkan konsumen di negara maju tersebut dan sebaliknya merugikan produsennya.

Kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama. Apabila harga dunia naik, konsumen di negara pengimpor, seperti Indonesia akan dirugikan, sebaliknya, produsen atau pengekspor sangat diuntungkan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangannya dengan meningkatkan mutu dan jumlah produksi dalam negeri, terutama untuk produk pangan sehingga pada tingkat tertentu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia.

Penurunan tarif tanpa disertai penurunan BD dan SE di NM dan NB dan penurunan tarif usulan Kelompok 20 memberikan dampak yang sama terhadap produksi, konsumsi, ekspor dan impor komoditas pertanian. Penurunan tarif dengan yang disertai dengan penurunan BD dan SE NM dan NB sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap keempat indikator kinerja sektor pertanian tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif bagi kinerja sektor pertanian karena meningkatkan produksi pertanian Indonesia, ekspor pertanian, dan mengurangi volume impor Indonesia. Namun, pihak konsumen dalam negeri menderita kerugian.

Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan yang nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk dan gula halus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan) serta komoditas

karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.

Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberikan keuntungan bagi NM, terutama bagi konsumennya sementara produsennya menderita kerugian, tetapi kerugian produsen dapat diimbangi oleh keuntungan konsumennya. Namun, di NB termasuk di Indonesia pihak konsumen akan dirugikan dan produsen akan diuntungkan. Bagi Indonesia, kerugian konsumen itu tidak dapat diimbangi oleh keuntungan yang diperoleh produsen. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi NM dan NB maka semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu Indonesia bersama-sama dengan anggota K 33 harus berupaya mempengaruhi NM agar melakukan reformasi kebijakan perdagangan mereka, yaitu dengan aktif berpartisipasi di dalam perundingan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Profil Jepang. www.Bexi.co.id/ (On Line) 2002.
- Agroindonesia. 2005. *Gov't to Lobby China on Cacao Tariffs*. Selasa, 3 Mei 2005. www.agroindonesia.com/ (on line). 19 Mei 2005.
- Aitken, N. D. 1973. "The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis," *American Economic Review* 63 (5): 881-892.
- Alamsyah, Andi Nur. 2005. *Virgin Coconut Oil Minyak Penakluk Aneka Penyakit*. Penerbit Agromedia. Jakarta.
- Balistreri, E. J. and R. H. Hillberry. 2004. *Trade Frictions and Welfare in the Gravity Model: How much of the Iceberg Melts?*, Mimeograph.
- Basri, F.H. 1991. *Perkembangan Terbaru Teori Perdagangan Internasional*. Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia. No. 1 Tahun VI, 1991. Hal. 219 – 245.
- Bikker, J. A. 1987. "An International Trade Flow Model with Substitution: An Extension of the Gravity Model," *Kyklos* 40 (3): 315-337.
- Brada, J. C. and J. A. Mendez. 1983. "Regional Economic Integration and the Volume of Intra-regional Trade: A Comparison of Developed and Developing Country Experience," *Kyklos* 36 (4): 589-603.
- Brulhart, Marius. 2002. *Marginal Intra – Industry Trade: Towards A Measure of Non-Disruptive Trade Expansion*. Ecole des HEC. University of Lausanne. Switzerland. www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers (on line). 18 Mei 2005.
- Chacoliades, M. 1990. *International Economics*. International Edition. McGraw-Hill. Singapore.
- Cheng, I-Hui and H.J. Wall. 2005. *Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration*. Review, January/February. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Cheng, I-Hui and H.J. Wall. 2005. *Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration*. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- CIE. 1997. *Economic Benefits from an AFTA-CER Free Trade Area*. Centre for International Economics Canberra&Sydney Commitments" Revision (TN/AG/W/Rev.1), 18 Maret 2003.
- Departemen Keuangan RI. 2004. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia – China Free Trade Area (FTA)*.
- Departemen Keuangan. 2001 – 2005. *Data Base Anggaran Pembangunan. Direktorat Pembiayaan I. Direktorat Jenderal Anggaran*.
- Diaz-Bonilla, E, M. Thomas, S.Robinson (2002), "On Boxes, Contents, and Users.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2005. *Surat Edaran Nomor: se- 10/bc/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (FTR) dan dalam Rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA*. Departemen Keuangan Republik. www.beacukai.go.id/ (on line). 10 Mei 2005.

- Dixit, P.T., Josling, and D. Blandford. 2001. *The Current WTO Agriculture Negotiations: Option for Progress, Syntesis*. International Agricultural Trade Research Consortium Commissioned paper No. 18.
- FAO. 2005. *FAOSTAT-Agriculture*. www.fao.org/ (on line). 12 Desember 2005.
- Feridhanusetyawan, T. 2003. *ASEAN – China FTA: A View from Jakarta*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta. www.mof.go.jp.chu/ (on line). 10 Mei 2005.
- Food Security and the WTO Negotiations”, IFPRI, TMD Discussion Paper.
- Frenkel, J. A. 1997. *Regional Trading Blocks in the World Economic System*. Institute for International Economics. Washington, D.C.
- Hadi, Prajogo Utomo, Ahmad Husni Malian, Adi Mesra Djulin, Adang Agustian, Sri Hastuti Suhartini dan Sri Hery Susilowati. 2002. *Kajian Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia Tahun 2001*. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Hadi, Prajogo Utomo, J. Situmorang, B. Wiryono, Rita N.S., T. Nurasa, dan S. Nuryanti. 2004. *Strategi dan Kebijakan Perdagangan Pertanian Pasca AoA – WTO*. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Hutabarat, B. dan B. Rahmanto. 2004. *Kerangka Pemikiran Penerapan Mekanisme Perlindungan Keamanan Khusus (Special Safeguard Mechanism) Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hutabarat. B., M. Husein Sawit, Supriyati, Bambang Rahmanto, Adi Setyanto dan Helena J. Purba, 2005. *Penyusunan bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral*. Laporan Akhir. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Kalbasi, H. 2005. *The Gravity Model and Global Trade Flows*. Mimeograph.
- Kenen, Peter B. 1989. *The International Economy*. 2nd ed. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall International Inc.
- Krugman, P. R. and M. Obstfeld. 2000. *International Economics: Theory and Policy*. Fifth Edition. International Edition Addison-Wesley Publishing Company. Massachusetts.
- Lily Yulianti Farid, 2005. *Susilo Bambang Yodoyono dan Investor Jepang*. www.Kompas.Com/ (On Line) 2 Juni 2005.
- McCallum, J. 1995. *National Borders Matters: Canada-U.S. RRegional Trade Patterns*, *American Economic Review* 63 (5): 881-892.
- Murphy, S and S. Suppan (2003), *“Introduction to the Development Box: Finding no.82 (revised July 2002)*.
- Perkembangan ASEAN. 2001. www.indonesianembassy.org.uk. 6 Desember 2005.
- Poonyth, Daneswar, and Ramesh Sharma, 2003. *The Impact od The Doha Development Round of Trade Negotiations on Developing Countries: Results From ATPSM*. Commodity Market Review 2003-2004. FAO, Rome.
- PTRI. 2005. *Laporan Pertemuan Cairns Group dasn G-20 di Jenewa pada tanggal 25 – 27 September 2005*.

- S. Pushpanathan, 2004. *Scaling New Heights in ASEAN-Japan Ties*. Head, ASEAN Plus Three Relation. www.aseansec.org/ (on line) 12 desember 2004.
- Sanso, M., R. Cuarian, and F. Sanz. 1993. "Bilateral Trade Flows, the Gravity Equation, and Functional Form," *Review of Economics and Statistics* 75 (2): 266-275.
- Sawit, M.H. 2003. *Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson. Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 1 (1).
- Sawit, M.H., 2003. *Perkembangan Perundingan Pertanian WTO: Proposal Harbinson dan Kepentingan Indonesia*. Paper. Tidak dipublikasikan. Disampaikan pada Seminar "Road to Cancun: Kesiapan Indonesia Menghadapi KTM V WTO, diselenggarakan oleh Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, 23 April 2003, Jakarta.
- Sawit, M.H., 2004a. *Penurunan Tarif buat Produk Pertanian Indonesia: Penerapan Blended Formula*. Paper. Tidak dipublikasikan. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., 2004b. *Penggunaan Tiered Formula untuk Pemotongan Tarif buat Produk Pertanian Indonesia*. Paper. Tidak dipublikasikan. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., A. Setiyanto, H.J. Purba, dan Supriyati, 2004. *Penyaringan SP (Special/Strategic Products) dengan Metoda I-O untuk Indonesia*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., B. Hutabarat, A. Setiyanto, H.J. Purba, Sri Nuryanti, dan Juni Hestina. 2005. *Fleksibilitas Pemilihan Special Products (SP) Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya?* Makalah. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor. Space for Development Concerns in the WTO's Agriculture Negotiations".
- Sawit, M.H., Kiki Partini, dan Agus D.I. 2003. *Notifikasi Produk Pertanian Indonesia di WTO dan Deminimis Untuk Beras*. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia* Vol. 51 (3), hal 271 – 289.
- Syafa'at, N., 2004. *Laporan Mengikuti Sidang Perundingan Khusus Pertanian (CoA) di WTO - Jeneva 12 - 18 Desember 2004*. Memo Dinas. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Tay, S. S.C., J. Estanislao, and H. Soesastro. 2000. *A New ASEAN In A New Millennium*. CSIS. Jakarta.
- UNCTAD. 2005. *ATPSM*. www.unctad.org/ (on line). 20 Mei 2005.
- Vanzetti, D., and Brett Graham. 2002. *Simulating Agriculturaal Policy Reform with ATPSM*. Paper. Trade Analisisi Branch, UNCTAD, Geneva.
- Vanzetti, D., and Ralf Peters. 2003. *An Analysis of the WTO, US and EU Proposals on Agricultural Reform*. Paper. Trade Analisisi Branch, UNCTAD, Geneva.
- Wall, H. J. 1999. "Using the Gravity Model to Estimate the Costs of Protection," *Review*, January/February. Federal Reserve Bank of St. Louis.

- Wei, S.-J. and J. A. Frenkel. 1997. "Open versus Closed Trading Blocs," In T. Ito and A. O. Krueger (Eds). *Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements*: pp. 119-139. University of Chicago Press, Chicago.
- World Bank. 2005. *Countries At A Glance Data*. www.worldbank.org/ (on line). 11 Juli 2005.
- WTO. 2000. *Agriculture: the WTO Agreements Series 3*, Secretariat WTO, Geneva.
- WTO. 2003. "Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text", Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2), 13 September 2004.
- WTO. 2003. "Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text", Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2), 13 September 2004.
- WTO. 2003a. "Negotiation on Agriculture: First Draft of Modalities for the Further.
- WTO. 2003b. "Preparation for the 5th Session of the Ministerial Conference: Draft .
- WTO. 2003c. *The Legal Texts. The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- WTO. 2004. *WTO Agriculture Negotiations: The Issues and Where We are Now*. www.wto.org/ (online). 1 Maret 2004.
- WTO. 2004a. "Summary Report on the 22nd Meeting of CoA Special Session", note.
- WTO. 2004b, "Doha Work Programme: Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004". ([http/www.wto.org/](http://www.wto.org/)).

Lampiran. Kerangka Dasar Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM)

Model ini mempunyai ciri bahwa harga dalam negeri adalah fungsi harga pasar dunia dan perlindungan perbatasan atau aturan-aturan pendukung dalam negeri yang khusus. Semua aturan proteksi dinyatakan dalam setara nilai tarif. Dengan mengasumsikan bahwa sebuah negara seringkali adalah pengimpor atau pengekspor satu (agregat) barang, tarif gabungan dihitung untuk menentukan harga konsumsi dan produksi dalam negeri. Angka ini diperoleh dengan membagi volume ke dalam tiga kelompok, impor, ekspor, dan produksi yang ditawarkan ke pasar dalam negeri (S_d). Pertama, tarif pasar dalam negeri (t_d) dihitung sebagai rata-rata terbobot dua pajak perdagangan, angka subsidi ekspor (t_x) dan tarif impor (t_m), dimana pembobotnya adalah ekspor (X) dan impor (M):

$$t_d = (X t_x + M t_m) / (M + X); \quad (L1)$$

Kemudian tarif konsumsi (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor (t_m) dan tarif pasar dalam negeri (t_d) dimana pembobotnya adalah impor (M) dan penawaran dalam negeri (S_d):

$$t_c = (M t_m + S_d t_d) / D; \quad (L2)$$

Dengan cara yang sama, tarif penawaran (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor (t_m) dan tarif pasar dalam negeri (t_d) dimana pembobotnya adalah ekspor (X) dan penawaran dalam negeri (S_d) ditambah tarif penawaran dalam negeri (t_p):

$$t_s = (X t_x + S_d t_d) / S + t_p; \quad (L3)$$

Dengan demikian sistem persamaan untuk semua negara sebenarnya adalah empat persamaan berikut ini, yang memperlihatkan konsumsi dalam negeri, produksi, ekspor, dan impor:

$$\widehat{D}_{i,r} = \varepsilon_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Ci,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \varepsilon_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Cj,r})] \quad (L4)$$

$$\widehat{S}_{i,r} = \mu_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Pi,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \mu_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Pj,r})] \quad (L5)$$

$$X_{i,r} = S_{i,r} \quad (L6)$$

$$M_{i,r} = D_{i,r} \widehat{D}_{i,r} - S_{i,r} \widehat{S}_{i,r} + X_{i,r} \quad (L7)$$

dimana ΔD , ΔS , ΔX dan ΔM masing-masing melambangkan permintaan, penawaran, ekspor dan impor, Λ melambangkan perubahan relatif dan Δ perubahan mutlak, P_w melambangkan harga dunia, t_c tarif konsumsi dalam negeri dan t_s tarif produksi dalam negeri, $\varepsilon_{i,j,r}$ elastisitas penawaran dan $\eta_{i,j,r}$ elastisitas permintaan i dan j adalah indeks komoditas dan r adalah indeks negara. Dengan mengolah D , S , X dan M dan P_w ke dalam vektor berdimensi 6300 ($175 * 36$) kali 1, sistem persamaan di atas dapat disederhanakan dan diselesaikan melalui pembalikan matriks.

Lampiran Tabel 1. Jadwal Penurunan Tarif Program EHP Bilateral Indonesia–China

Kategori Produk	Deskripsi	Tidak lebih dari 1/1/04	Tidak lebih dari 1/1/05	Tidak lebih dari 1/1/06
1	Produk dengan tingkat tarif umum lebih tinggi dari 15% untuk China dan Indonesia	10%	5%	0%
2	Produk dengan tingkat tarif umum antara 5%-15% untuk China dan Indonesia	5%	0%	0%
3	Produk dengan tarif umum lebih rendah dari 5% untuk China dan Indonesia	0%	0%	0%

Sumber: www.beacukai.go.id

Lampiran Tabel 2. Daftar Produk Spesifik Kode HS Empat Digit *Early Harvest Package* Indonesia–China *Free Trade Area*

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk	Jumlah Pos Tarif
1	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapa pun	1
2	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	11
3	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut	15
4	15.17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati	8
5	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao	1
6	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak	5
7	40.16	Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras	1
8	70.11	<i>Glass envelope</i> (termasuk bulb dan tabung), terbuka, dan bagiannya dari kaca, tanpa alat kelengkapan untuk lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya	2
9	94.01	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya	1
10	94.03	Perabotan lain dan bagiannya	1

Sumber: Departemen Keuangan RI, 2004.

Lampiran Tabel 3. Kelompok Produk Impor dari China ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar*, 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	0703	1701	2401	1202	3201	2931	3105	2941	3103	2526
	(13,09)	(11,07)	(8,80)	(5,34)	(4,73)	(3,97)	(3,00)	(2,45)	(2,32)	(2,20)
1997	1005	2401	0703	3204	3104	4407	2510	2941	2909	2933
	(15,52)	(14,57)	(12,25)	(5,92)	(5,81)	(1,90)	(1,89)	(1,81)	(1,80)	(1,74)
1998	1006	0703	3204	1005	2401	1701	3104	2935	2933	0502
	(24,24)	(9,37)	(9,22)	(9,20)	(6,07)	(5,69)	(2,44)	(1,98)	(1,75)	(1,25)
1999	1006	2401	1005	1701	0703	3104	3204	3103	2510	1201
	(37,06)	(8,66)	(7,05)	(4,60)	(4,41)	(3,67)	(3,31)	(2,35)	(1,66)	(1,51)
2000	1006	1005	2401	3204	0703	0808	0805	4011	1701	3105
	(16,07)	(15,81)	(8,05)	(6,23)	(5,33)	(4,55)	(3,06)	(2,13)	(2,04)	(1,86)
2001	2401	0703	1005	0808	3204	0805	2921	3105	2933	4002
	(14,02)	(8,45)	(7,19)	(7,12)	(6,71)	(2,64)	(2,55)	(2,41)	(2,15)	(1,94)
2002	1005	0808	0703	3204	2401	1006	0805	3105	1101	1001
	(15,77)	(8,67)	(6,75)	(5,78)	(5,17)	(3,49)	(2,91)	(2,65)	(2,46)	(2,07)
2003	1005	0808	0703	3204	2401	0805	1101	4104	3105	2921
	(21,97)	(7,40)	(6,63)	(4,96)	(4,41)	(2,96)	(2,24)	(1,74)	(1,68)	(1,58)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari China ke Indonesia

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 4. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke China dengan Pangsa Pasar Terbesar*, 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	0303	0306	0803	1511	1520	1801	3102	4001	4412	4418
	(41,96)	(12,50)	(11,93)	(7,58)	(2,80)	(2,68)	(2,17)	(1,95)	(1,89)	(1,73)
1997	0303	0306	1507	1511	1513	1801	2915	4001	4412	4418
	(34,50)	(27,22)	(7,01)	(5,17)	(3,34)	(3,28)	(2,62)	(2,28)	(1,88)	(1,72)
1998	0303	0306	0803	1511	1801	2905	4001	4106	4412	4418
	(41,68)	(11,73)	(6,87)	(5,30)	(4,42)	(3,48)	(2,42)	(2,34)	(2,26)	(1,91)
1999	0303	0306	1511	2905	2915	2917	4001	4409	4412	4418
	(21,00)	(16,55)	(9,56)	(6,88)	(6,57)	(5,59)	(4,23)	(2,82)	(2,24)	(2,15)
2000	1511	1513	2902	2905	2915	2917	4001	4409	4412	4418
	(18,76)	(16,25)	(10,41)	(9,57)	(6,24)	(5,78)	(3,23)	(2,85)	(2,58)	(2,08)
2001	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4407	4409	4412	4418
	(11,97)	(11,12)	(9,36)	(9,09)	(7,79)	(7,77)	(5,89)	(5,14)	(3,85)	(3,64)
2002	1511	2917	4412	4409	2902	4407	4418	2905	1513	4001
	(17,17)	(15,47)	(9,41)	(7,64)	(7,30)	(6,39)	(5,70)	(4,38)	(3,22)	(2,94)
2003	0303	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4409	4412	4418
	(22,79)	(13,63)	(9,64)	(6,80)	(6,35)	(6,07)	(4,72)	(4,06)	(3,93)	(3,09)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total ekspor produk Indonesia ke China

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 5. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan China ^{*)}, 1996-2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk ^{*)}
1	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
2	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam
3	05.02	Bulu atau bulu kasar dari babi, babi ternak dan babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat
4	07.03	Bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya segar atau dingin
5	08.03	Pisang, termasuk plantain, segar atau kering
6	08.05	Buah jeruk, segar atau kering
7	08.08	Apel, pir, dan quince, segar
8	10.01	Gandum dan meslin
9	10.04	Oat
10	10.05	Jagung
11	10.06	Beras
12	11.01	Tepung gandum, atau tepung meslin
13	12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak
14	12.02	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti, atau pecah maupun tidak
15	15.07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
16	15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
17	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
18	15.20	Gliserol, kasar; air gliserol dan larutan alkali gliserol
19	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
20	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
21	18.01	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng
22	24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau
23	25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat
24	25.26	Steatit alam, talc
25	29.02	Hidrokarbon siklik
26	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
27	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alcohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida
28	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya

Lampiran Tabel 5.Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
29	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
30	29.21	Senyawa berfungsi amina
31	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya
32	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen
33	29.35	Sulfonamida
34	29.41	Antibiotik
35	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
36	31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat
37	31.04	Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium
38	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua tau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya
39	32.04	Bahan pewarna organik sintetis
40	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
41	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
42	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet
43	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet
44	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
45	41.06	Jangat atau kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
46	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
47	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
48	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
49	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake

*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004.

Lampiran Tabel 6. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia-China^{*)}, 1996–2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
05.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
07.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.08	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)
10.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,24 (0,17)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.06	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
11.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)
15.07	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.11	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.13	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.20	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,55 (0,62)	0,00 (0,00)	0,74 (0,17)	0,08 (0,08)	0,00 (0,00)
18.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,07 (0,08)	0,00 (0,00)	0,16 (0,27)
24.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)
40.02	0,04 (0,04)	0,83 (0,99)	0,48 (0,62)	0,63 (0,75)	0,58 (0,76)	0,85 (0,66)	0,95 (0,80)	0,66 (0,85)
40.11	0,72 (0,58)	0,04 (0,34)	0,44 (0,59)	0,03 (0,10)	0,01 (0,03)	0,02 (0,04)	0,01 (0,03)	0,05 (0,24)
40.12	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,36 (0,51)	0,01 (0,03)	0,95 (0,67)	0,00 (0,00)
41.04	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,80 (0,70)	0,47 (0,29)	0,07 (0,07)	0,08 (0,10)	0,10 (0,17)	0,20 (0,23)
41.06	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,08 (0,11)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,21 (0,22)

^{*)} Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 7. Kelompok Produk Impor dari Jepang ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	2917	4002	2905	2902	2933	2916	3204	4011	2915	2901
	(15,90)	(8,85)	(8,38)	(8,01)	(6,85)	(4,17)	(3,92)	(3,55)	(2,83)	(2,59)
1997	2902	2905	2917	4002	2933	2901	2916	3204	2915	4011
	(14,38)	(9,35)	(7,56)	(6,51)	(4,95)	(4,64)	(4,27)	(3,41)	(3,29)	(3,13)
1998	2902	2905	2933	4002	2917	3204	4011	2915	3403	3402
	(13,94)	(9,80)	(8,88)	(6,51)	(6,03)	(4,36)	(3,94)	(3,72)	(3,27)	(2,77)
1999	1006	2902	2905	2933	4011	4002	3204	2915	3403	2907
	(26,27)	(15,59)	(6,94)	(4,76)	(3,53)	(3,32)	(3,15)	(2,61)	(2,36)	(1,78)
2000	2902	2905	2933	4002	3204	4016	4011	2915	3403	1006
	(11,08)	(9,21)	(6,30)	(6,24)	(4,46)	(4,01)	(3,51)	(3,35)	(3,14)	(3,01)
2001	2902	2933	4016	4002	2905	4011	3204	3403	2915	2929
	(11,13)	(6,75)	(6,58)	(5,98)	(5,33)	(4,71)	(3,96)	(3,91)	(3,31)	(2,71)
2002	2902	4016	4002	2933	3204	4011	3403	2905	4009	1006
	(10,11)	(6,02)	(5,34)	(4,70)	(4,55)	(4,24)	(3,89)	(3,75)	(2,90)	(2,84)
2003	2902	4016	2933	2905	4011	4002	2915	3403	3204	4009
	(11,69)	(6,20)	(6,19)	(5,85)	(4,78)	(4,72)	(3,53)	(3,36)	(3,19)	(2,68)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Jepang ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 8. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Jepang dengan Pangsa Pasar Terbesar*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	4412	0306	4413	4418	4001	0901	4407	0302	0305	0303
	(42,50)	(21,77)	(5,05)	(4,11)	(3,98)	(3,19)	(2,25)	(1,82)	(1,74)	(1,04)
1997	4412	0306	4413	4001	4418	0901	0302	4407	0305	0303
	(43,41)	(22,93)	(3,60)	(3,60)	(3,35)	(3,21)	(2,42)	(2,13)	(1,59)	(1,54)
1998	0306	4412	0901	4418	4001	0302	0305	0303	1604	2922
	(0,33)	(0,28)	(0,05)	(0,05)	(0,03)	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
1999	4412	0306	0901	4413	4418	4001	0302	0305	2905	1604
	(21,00)	(16,55)	(9,56)	(6,88)	(6,57)	(5,59)	(4,23)	(2,82)	(2,24)	(2,15)
2000	4412	0306	4413	4418	4001	0901	0302	2905	4409	0305
	(34,85)	(25,30)	(4,48)	(4,28)	(3,78)	(3,09)	(2,87)	(1,94)	(1,29)	(1,28)
2001	4412	0306	4418	4413	4001	0302	0901	2905	0305	4011
	(33,52)	(25,27)	(4,45)	(3,89)	(3,72)	(2,98)	(2,22)	(1,68)	(1,66)	(1,54)
2002	0302	0305	0306	0901	4001	4011	4409	4412	4413	4418
	(33,18)	(22,68)	(7,13)	(4,00)	(3,56)	(3,46)	(2,49)	(2,16)	(1,85)	(1,52)
2003	4412	0306	4001	4413	4418	0302	4011	0901	4409	2905
	(28,90)	(21,84)	(9,81)	(4,02)	(3,52)	(3,14)	(2,88)	(2,25)	(2,19)	(1,78)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Jepang ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 9. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Jepang *), 1996–2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
1	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04
2	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
3	03.05	Ikan, kering, asin atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan ; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia
4	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam
5	07.04	Kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin
6	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin
7	07.14	Ubi kayu
8	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak
9	09.02	Teh, diberi rasa maupun tidak
10	09.04	Lada dari genus <i>piper</i> ; kering atau dihancurkan atau buah yang digiling dari genus <i>capsicum</i> atau dari genus <i>pimenta</i>
11	09.10	Jahe, saffron, turmeric (<i>curcuma</i>), thyme, daun salam, kari dan rempah-rempah lainnya
12	10.05	Jagung
13	10.06	Beras
14	15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
15	15.20	Gliserol, kasar; air gliserol dan larutan alkali gliserol
16	16.04	Ikan diolah atau diawetkan, kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan
17	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
18	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
19	17.03	Tetes dari hasil ekstraksi atau permurnian gula
20	18.04	Mentega, lemak dan minyak kakao
21	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao
22	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak(dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makarani, mie, lasagna,gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak
23	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya, yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau tambahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya
24	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadsar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya ; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.

Lampiran Tabel 9. Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
25	23.01	Tepung, tepung kasar dan pellet, dari daging atau sisanya dari ikan atau krustasea, moluska dan inventebarata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia, greaves.
26	23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari serelia atau tanaman dari polongan
27	23.06	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 dan 23.05
28	25.03	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
29	25.07	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak
30	29.01	Hidrokarbon asiklik
31	29.02	Hidrokarbon siklik
32	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon
33	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
32	29.07	Fenol ; Fenol alkohol
33	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
34	29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halide paroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitronisasinya.
35	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
36	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen
37	29.29	Senyawa dan fungsi nitrogen lainnya
38	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen
39	31.01	Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak, pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati
40	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
41	32.04	Bahan pewarna organik sintesis , mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; produk organik sintesis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
42	34.01	Sabun, produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak, mengandung sabun ataupun tidak, produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun ataupun tidak, kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
43	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun)

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
44	34.03	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti karat atau anti korosi, preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas)
45	35.05	Dekstrin dan pati yang diakomodasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diestefierifikasi); perekat yang terbuat dari pati yang dimodifikasi lainnya
46	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
47	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
48	40.09	Tabung, pipa dan selang dari karet divulkanisasi, selain karet keras dengan atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, flensa)
49	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet
50	40.13	Ban dalam dari karet
51	40.16	Barang lain dari karet, divulkanisasi selain karet keras
52	44.01	Kayu bakar berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dalam sisa bekas serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet, atau bentuk semacam itu.
53	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
54	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
55	44.12	Kayu lapis panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
56	44.13	Kayu dpadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
57	44.15	Peti, Kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya
58	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake
56	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah, kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam atau barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornament lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk bab 94
60	44.21	Barang lainnya dari kayu lainnya

*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004

Lampiran Tabel 10. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia-Jepang*, 1996-2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
03.02	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,01)	0,01 (0,01)
03.03	0,07 (0,05)	0,04 (0,02)	0,02 (0,02)	0,02 (0,05)	0,26 (0,15)	0,16 (0,15)	0,03 (0,05)	0,07 (0,08)
03.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,01 (0,00)	0,03 (0,00)	0,07 (0,01)	0,02 (0,01)	0,01 (0,00)	0,04 (0,02)
03.06	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
09.01	0,02 (0,05)	0,01 (0,01)	0,06 (0,06)	0,01 (0,01)	0,06 (0,05)	0,03 (0,04)	0,17 (0,22)	0,15 (0,31)
10.06	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)
16.04	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,02)	0,01 (0,00)	0,01 (0,01)
29.01	0,32 (0,12)	0,74 (0,00)	0,31 (0,54)	0,00 (0,23)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,02)	0,00 (0,00)
29.02	0,36 (0,14)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,02)	0,00 (0,03)	0,02 (0,02)	0,21 (0,27)
29.05	0,44 (0,46)	0,53 (0,47)	0,93 (0,67)	0,72 (0,79)	0,70 (0,86)	0,49 (0,87)	0,40 (0,77)	0,37 (0,83)
29.07	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,02)	0,00 (0,01)	0,01 (0,05)	0,08 (0,09)
29.15	0,51 (0,42)	0,50 (0,47)	0,48 (0,58)	0,49 (0,65)	0,41 (0,49)	0,57 (0,46)	0,45 (0,44)	0,15 (0,22)
29.16	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,28 (0,22)	0,98 (0,73)	0,66 (0,82)	0,34 (0,87)	0,84 (0,44)	0,76 (0,69)
29.17	0,00 (0,00)	0,12 (0,10)	0,24 (0,18)	0,04 (0,03)	0,06 (0,05)	0,14 (0,11)	0,85 (0,70)	0,97 (0,79)
29.22	0,07 (0,28)	0,24 (0,30)	0,05 (0,16)	0,04 (0,74)	0,04 (0,25)	0,03 (0,21)	0,06 (0,31)	0,04 (0,24)
29.29	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
29.33	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,02 (0,02)	0,08 (0,07)	0,25 (0,15)	0,36 (0,23)	0,44 (0,32)	0,95 (0,30)
32.04	0,08 (0,04)	0,24 (0,16)	0,10 (0,06)	0,18 (0,10)	0,26 (0,14)	0,28 (0,14)	0,56 (0,33)	0,96 (0,78)
34.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,00 (0,03)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,01 (0,00)	0,05 (0,03)	0,09 (0,06)
40.09	0,09 (0,02)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,02 (0,01)	0,03 (0,02)	0,95 (0,02)	0,08 (0,03)
40.11	0,67 (0,46)	0,59 (0,50)	0,66 (0,43)	0,89 (0,83)	0,73 (0,97)	0,60 (0,86)	0,47 (0,66)	0,31 (0,54)
40.16	0,34 (0,36)	0,24 (0,37)	0,21 (0,35)	0,41 (0,53)	0,46 (0,38)	0,36 (0,32)	0,48 (0,44)	0,62 (0,64)

Lampiran Tabel 10. Lanjutan

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
44.09	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,80 (0,70)	0,47 (0,29)	0,07 (0,07)	0,08 (0,10)	0,10 (0,17)	0,20 (0,23)
44.12	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,08 (0,11)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,21 (0,22)
44.13	0,57 (0,61)	0,86 (0,78)	0,62 (0,76)	0,35 (0,74)	0,32 (0,89)	0,06 (0,26)	0,01 (0,08)	0,05 (0,15)
44.18	0,21 (0,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,01)

*) Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 11. Kelompok Produk Impor dari Korea Selatan ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	1701 (28,98)	2523 (10,74)	2901 (9,65)	2902 (5,95)	2917 (4,68)	3204 (4,61)	3506 (3,07)	4002 (2,99)	4005 (2,48)	4104 ()
1997	2901 (22,29)	2902 (10,64)	2917 (9,45)	3105 (7,53)	3204 (6,20)	3506 (4,13)	4002 (3,12)	4005 (2,73)	4010 (2,55)	4104 (2,19)
1998	1701 (28,20)	2901 (15,44)	2902 (10,76)	2907 (5,79)	2917 (5,46)	3204 (3,95)	3402 (2,92)	3506 (2,78)	4002 (1,88)	4104 (1,27)
1999	2902 (25,42)	4104 (21,37)	2917 (7,67)	4002 (5,26)	2901 (4,25)	3204 (2,72)	3102 (2,17)	1701 (2,13)	2915 (1,88)	3402 (1,78)
2000	1701 (33,01)	2901 (17,65)	2902 (7,74)	2905 (5,44)	2917 (2,54)	2929 (2,24)	3204 (2,11)	3506 (1,94)	4002 (1,90)	4104 (1,78)
2001	2901 (35,98)	2902 (17,34)	2905 (5,30)	2917 (4,51)	3105 (3,53)	3204 (2,74)	3402 (2,07)	3506 (2,01)	4002 (1,86)	4104 (1,73)
2002	2902 (30,24)	2917 (12,69)	2929 (6,80)	2934 (4,93)	3102 (2,91)	3105 (2,73)	3402 (2,50)	3506 (2,36)	4002 (2,34)	4104 (2,23)
2003	2106 (18,12)	2901 (10,17)	2902 (9,74)	2915 (5,23)	2929 (3,73)	3102 (3,39)	3105 (3,20)	3506 (2,94)	4002 (2,93)	4104 (2,40)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Korea Selatan ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 12. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Korea Selatan dengan Pangsa Pasar Terbesar*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	09001	1513	2302	2306	4001	4402	4407	4412	4413	4418
	(36,99)	(16,26)	(14,70)	(4,46)	(3,28)	(2,37)	(2,30)	(2,24)	(2,07)	(1,48)
1997	0901	1513	1703	2302	2306	4001	4407	4412	4413	4418
	(30,20)	(17,90)	(15,01)	(4,58)	(3,79)	(3,09)	(2,89)	(2,81)	(1,79)	(1,4)
1998	0714	0901	1513	2302	2306	2934	3102	4001	4412	4418
	(22,76)	(18,03)	(7,07)	(6,39)	(4,97)	(4,79)	(4,22)	(3,53)	(3,19)	(3,18)
1999	0901	1513	2302	2905	2934	4001	4402	4409	4412	4418
	(27,28)	(12,11)	(10,64)	(4,49)	(4,03)	(3,96)	(3,39)	(2,97)	(2,47)	(2,18)
2000	1503	2302	2905	4001	4402	4409	4411	4412	4413	4418
	(23,34)	(10,60)	(9,68)	(4,75)	(3,31)	(3,29)	(3,26)	(3,14)	(3,12)	(2,78)
2001	2302	2905	2922	2934	4001	4409	4411	4412	4413	4418
	(27,29)	(11,40)	(7,80)	(4,83)	(4,34)	(4,07)	(3,92)	(3,92)	(3,90)	(1,91)
2002	2302	2905	2934	3102	4001	4409	4411	4412	4413	4418
	(11,73)	(11,34)	(10,25)	(5,73)	(5,29)	(4,18)	(3,76)	(3,70)	(3,61)	(2,94)
2003	0303	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4409	4412	4418
	(22,79)	(13,63)	(5,08)	(4,69)	(4,66)	(3,91)	(3,62)	(3,48)	(3,21)	(3,07)

*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 13. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan *), 1996–2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
1	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
2	07.14	Ubi kayu
3	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak
4	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
5	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
6	17.03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula
7	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci
8	23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari sereal atau dari tanaman polongan
9	23.06	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari kacang kedelai dan kacang tanah
10	25.23	Semen Portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau belum dalam bentuk clinker
11	29.01	Hidrokarbon asiklik
12	29.02	Hidrokarbon siklik
13	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi, atau nitrosasinya
14	29.07	Fenol, fenol alkohol
15	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi, atau nitrosasinya

Lampiran Tabel 13. Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
16	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
17	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen
18	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya
19	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak, senyawa heterosiklik lainnya
20	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
21	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua tau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya
22	32.04	Bahan pewarna organik sintetis
23	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun)
24	35.06	Perekat olahan dan ahesif olahan lainnya
25	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
26	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
27	40.05	Karet campuran, tidak divulkanisir, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
28	40.10	Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi
29	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
30	44.02	Arang kayu
31	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
32	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
33	44.11	Papan fiber dari kayunatau bahan mengandung lignin lainnya
34	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
35	44.13	Kayu dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
36	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake

*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004.

Lampiran Tabel 14. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd Menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia–Korea Selatan^{*)}, 1996–2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
07.14	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
09.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)
15.13	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.01	0,00 (0,00)	0,40 (0,08)	0,21 (0,03)	0,39 (0,16)	0,00 (0,00)	0,04 (0,10)	0,04 (0,01)	0,01 (0,01)
17.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,49 (0,02)	0,37 (0,01)	0,10 (0,01)	0,00 (0,00)
21.06	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,09 (0,08)	0,08 (0,07)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)
23.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
23.26	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,01)
40.02	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,11 (0,08)	0,11 (0,07)	0,22 (0,11)	0,00 (0,01)	0,02 (0,02)
40.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,06 (0,02)	0,05 (0,01)	0,75 (0,00)	0,31 (0,11)
40.10	0,00 (0,00)	0,04 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1,00 (0,42)	0,58 (0,12)	0,08 (0,01)	0,02 (0,01)
41.04	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,01 (0,01)	0,01 (0,01)	0,04 (0,04)	0,06 (0,06)	0,05 (0,05)

^{*)} Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 15. Hasil Analisis Indikator Kriteria *Food Security*

No	Komoditas	Indikator Kriteria				
		SS (%)	PK (%)	KK (%)	KP (%)	KI (%)
1	Padi dan Beras	92,98	97,71	51,60	44,59	7,02
2	Jagung Pipilan Kering	81,04	5,15	1,46	1,28	34,01
3	Biji Gandum	0,00	45,39	7,89	6,17	100,00
4	Padi-padian lainnya	89,91	11,93	0,82	0,72	11,22
5	Ubikayu	91,03	35,85	3,01	0,77	0,00
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	97,10	26,30	1,00	1,11	0,03
7	Kedelai	49,73	40,92	2,80	9,96	33,58
8	Kacang Tanah	99,36	16,62	0,41	0,92	4,87
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	94,12	10,32	0,44	0,45	0,00
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	99,17	66,13	0,20	0,31	7,61
11	Tomat	99,39	57,42	0,06	0,56	25,50
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	87,48	58,94	0,21	0,26	0,00
13	Kentang	99,77	20,14	0,22	0,87	78,35
14	Kol/Kubis	71,93	21,70	0,12	0,52	0,00
15	Pisang	99,69	39,95	3,78	2,24	1,88
16	Mangga	88,66	1,22	0,02	0,02	14,07
17	Jeruk	99,25	9,00	0,10	0,07	9,09
18	Nenas	99,95	1,41	0,02	0,02	4,74
19	Durian	87,67	1,68	0,14	0,04	14,07
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	99,24	68,74	3,11	1,17	2,40
21	Kelapa	99,66	48,82	7,11	1,04	4,09
22	Kelapa sawit	99,92	52,33	5,80	0,01	0,01
23	Tebu dan Gula	73,07	96,10	5,58	0,16	0,00
24	Karet	78,50	0,00	0,00	0,00	2,22
25	Kopi	96,18	58,15	0,81	1,21	2,96
26	Teh	99,98	68,57	0,16	0,81	0,01
27	Kakao	99,67	1,24	0,02	0,02	0,28
28	Jambu Mete	99,98	0,34	0,29	0,62	0,05
29	Cengkeh	48,69	31,67	0,00	0,00	17,14
30	Tembakau	100,00	67,05	0,00	0,00	0,00
31	Tanaman Rempah dan Obat	96,22	53,57	0,68	0,72	7,78
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	12,71	69,78	0,00	0,00	70,09
33	Tanaman Pertanian Lainnya	99,23	43,64	1,81	0,45	1,16
34	Ternak Kecuali Susu Segar	96,14	41,84	0,64	2,29	12,22
35	Susu Segar	27,18	17,97	0,97	1,37	28,56
36	Unggas dan hasil-hasilnya	86,72	48,15	2,62	6,84	0,00
37	Hasil Peternakan lainnya	58,09	0,72	0,00	0,02	73,31

Keterangan:

SS = Self Sufficiency; PK = Partisipasi Konsumsi; KK = Konsumsi Kalori; KP = Konsumsi Protein; KI = Ketergantungan Impor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 16. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus menurut Masing-masing Indikator pada Kriteria *Food Security*

No	Komoditas	Indikator Kriteria					Hasil Valuasi
		SS (%)	PK (%)	KK (%)	KP (%)	KI (%)	
1	Padi dan Beras	#	#	#	#	#	*
2	Jagung Pipilan Kering	#	#	#	#	#	*
3	Biji Gandum	#	#	#	#	#	*
4	Padi-padian lainnya	#	#	#	#	#	*
5	Ubikayu	#	#	#	#	#	*
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	#	#	#	#	#	*
7	Kedelai	#	#	#	#	#	*
8	Kacang Tanah	#	#	#	#	#	*
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	#	#	#	#	#	*
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	#	#	#	#	#	*
11	Tomat	#	#	#	#	#	*
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	#	#	#	#	#	*
13	Kentang	#	#	#	#	#	*
14	Kol/Kubis	#	#	#	#	#	*
15	Pisang	#	#	#	#	#	*
16	Mangga	#	#	#	#	#	*
17	Jeruk	#	#	#	#	#	*
18	Nenas	#	#	#	#	#	*
19	Durian	#	#	#	#	#	*
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	#	#	#	#	#	*
21	Kelapa	#	#	#	#	#	*
22	Kelapa sawit	#	#	#	#	#	*
23	Tebu dan Gula	#	#	#	#	#	*
24	Karet	#	#	#	#	#	*
25	Kopi	#	#	#	#	#	*
26	Teh	#	#	#	#	#	*
27	Kakao	#	#	#	#	#	*
28	Jambu Mete	#	#	#	#	#	*
29	Cengkeh	#	#	#	#	#	*
30	Tembakau	#	#	#	#	#	*
31	Tanaman Rempah dan Obat	#	#	#	#	#	*
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	#	#	#	#	#	*
33	Tanaman Pertanian Lainnya	#	#	#	#	#	*
34	Ternak Kecuali Susu Segar	#	#	#	#	#	*
35	Susu Segar	#	#	#	#	#	*
36	Unggas dan hasil-hasilnya	#	#	#	#	#	*
37	Hasil Peternakan lainnya	#	#	#	#	#	*
	Treshold dan Jumlah Komoditas Hasil Valuasi	75%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%	23

Keterangan:

SS = Self Sufficiency; PK = Partisipasi Konsumsi; KK = Konsumsi Kalori; KP = Konsumsi Protein; KI = Ketergantungan Impor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 17. Hasil Analisis Indikator Kriteria *Livelihood Security* pada Penentuan Produk Khusus

No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Lahan/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp /Org)	Jumlah TK (Org)
1	Padi	27,30	96,65	27,95	33,21	0,95	1,11	12.248.829
2	Jagung	4,81	69,45	6,07	9,78	1,26	1,03	2.521.413
3	Gandum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486
4	Padi-padian lainnya	0,10	15,84	0,41	0,36	0,70	0,33	169.857
5	Ubikayu	1,56	41,78	2,90	3,65	0,91	0,70	1.204.352
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	0,54	91,61	3,93	0,53	0,11	0,18	1.632.236
7	Kedelai	0,86	66,42	2,04	2,30	0,68	0,55	847.248
8	Kacang Tanah	1,00	71,95	3,63	1,87	0,39	0,36	1.508.916
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	0,61	94,16	2,33	1,03	0,36	0,34	966.225
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	1,24	72,65	2,59	0,46	0,15	0,62	1.076.995
11	Tomat	0,54	63,25	0,74	0,13	0,15	0,94	308.794
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	2,05	80,73	2,10	0,39	0,16	1,27	871.071
13	Kentang	1,12	93,09	1,03	0,18	0,15	1,42	425.935
14	Kol/Kubis	0,36	94,35	1,03	0,18	0,15	0,45	426.921
15	Pisang	2,23	80,00	1,70	0,22	0,11	1,71	705.416
16	Mangga	1,79	98,94	2,29	0,29	0,11	1,01	952.590
17	Jeruk	1,21	91,67	0,84	0,11	0,11	1,86	350.043
18	Nenas	0,15	99,65	1,28	0,16	0,10	0,15	529.740
19	Durian	1,62	83,61	0,76	0,10	0,10	2,77	316.212
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	6,02	91,27	11,50	1,96	0,14	0,68	4.775.459
21	Kelapa	3,19	74,90	2,15	10,04	3,23	1,93	893.531
22	Kelapa sawit	4,54	59,98	1,00	10,96	8,18	5,87	416.821
23	Tebu	6,58	61,45	1,51	1,05	0,35	3,27	1.052.929
24	Karet	0,84	95,89	1,02	10,00	3,91	1,07	424.492
25	Kopi	1,55	78,91	1,25	3,54	2,19	1,61	517.852
26	Teh	0,31	78,00	0,51	0,45	0,59	0,79	213.873
27	Kakao	1,37	82,72	0,59	2,08	2,31	3,02	244.899

Lampiran Tabel 17. Lanjutan

No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Lahan/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp /Org)	Jumlah TK (Org)
29	Cengkeh	0,75	96,92	0,94	1,21	0,99	1,03	392.418
30	Tembakau	2,33	62,98	1,24	0,62	0,22	2,45	513.865
31	Tanaman Rempah dan Obat	10,73	62,81	2,27	1,09	0,33	6,12	944.738
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	1,09	89,93	1,27	0,11	0,03	1,11	528.040
33	Tanaman Pertanian Lainnya	0,46	52,89	0,31	0,38	0,79	1,89	130.195
34	Ternak Kecuali Susu Segar	6,23	76,92	5,01	3,95	16,87	1,61	2.082.354
35	Susu Segar	0,29	94,53	0,36	0,03	1,10	1,06	149.455
36	Unggas dan hasil-hasilnya	10,03	40,82	5,31	95,89	292,24	2,45	2.206.531
37	Hasil Peternakan lainnya	0,60	60,12	0,20	0,13	13,70	3,87	82.977

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 18. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus berdasarkan Indikator-indikator pada Kriteria *Livelihood Security*

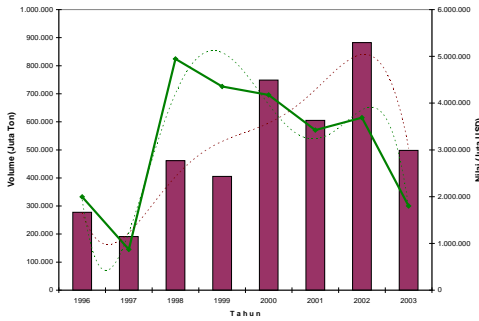
No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Laha/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp/Org)	Jumlah TK (Org)	Hasil Valuasi
1	Padi	#	#	#	#	#	#	#	*
2	Jagung	#	#	#	#	#	#	#	*
3	Gandum					#	#		
4	Padi- padian lainnya					#	#	#	*
5	Ubikayu			#	#	#	#	#	*
6	Ubi Jalar dan Umbi- umbian Lainnya		#	#		#	#	#	*
7	Kedelai		#	#	#	#	#	#	*
8	Kacang Tanah		#	#		#	#	#	*
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang- kacangan lainnya		#	#		#	#	#	*
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit		#	#		#	#	#	*
11	Tomat		#			#	#	#	*
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	#	#	#	#	#	#	#	*
13	Kentang		#			#	#	#	*
14	Kol/Kubis		#			#	#	#	*
15	Pisang	#	#			#	#	#	*
16	Mangga		#	#		#	#	#	*
17	Jeruk		#			#	#	#	*
18	Nenas		#			#	#	#	*
19	Durian		#			#	#	#	*
20	Sayuran dan Buah- buahan lainnya	#	#	#	#	#	#	#	*
21	Kelapa	#	#	#	#	#	#	#	*
22	Kelapa sawit	#	#		#		#	#	*
23	Tebu	#	#			#	#	#	*
24	Karet		#		#	#	#	#	*
25	Kopi		#		#	#	#	#	*
26	Teh		#			#	#	#	*

Lampiran Tabel 18. Lanjutan

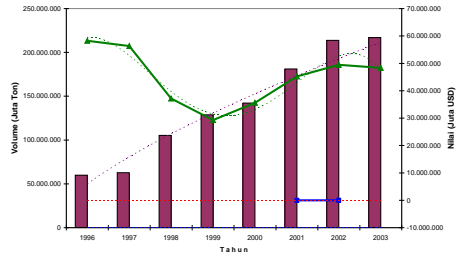
No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Laha/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp/Org)	Jumlah TK (Org)	Hasil Valuasi
27	Kakao		#		#	#	#	#	*
28	Jambu Mete		#			#	#	#	*
29	Cengkeh		#			#	#	#	*
30	Tembakau	#	#			#	#	#	*
31	Tanaman Rempah dan Obat	#	#	#		#	#	#	*
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat		#			#	#	#	*
33	Tanaman Pertanian Lainnya		#		#	#	#	#	*
34	Ternak Kecuali Susu Segar	#	#	#	#		#	#	*
35	Susu Segar		#			#	#	#	*
36	Unggas dan hasil- hasilnya	#		#	#	#	#	#	*
37	Hasil Peternakan lainnya		#			#	#	#	*
		2,00%	45%	2,00%	2,00	< 5 Ha	< 10 Jt	> 50000	36

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

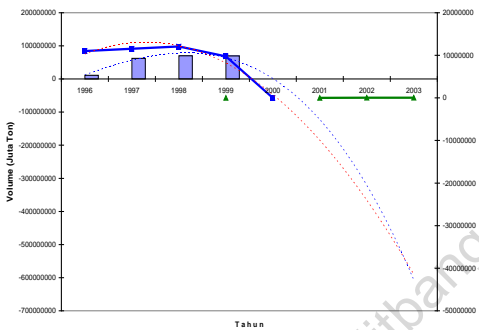
Lampiran Grafik 1. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-China, 1996-2003



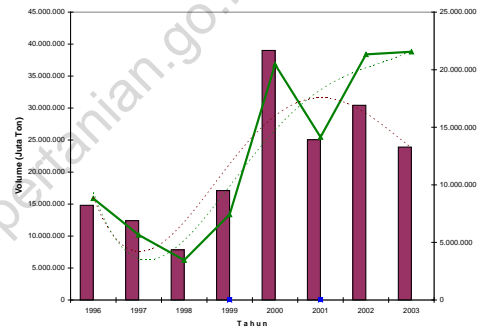
HS 05.02



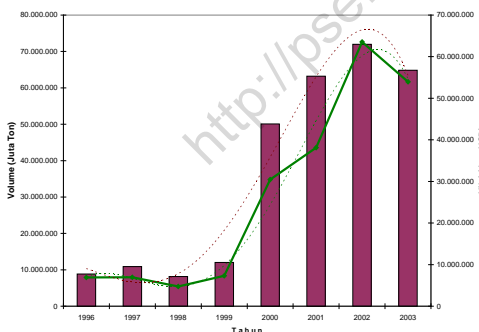
HS 07.03



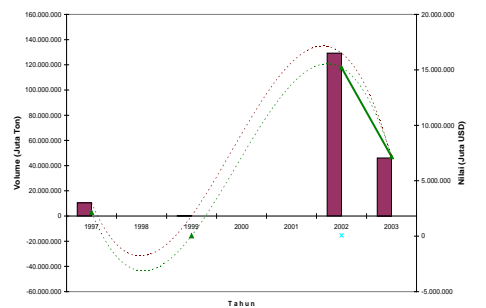
HS 08.03



HS 08.05

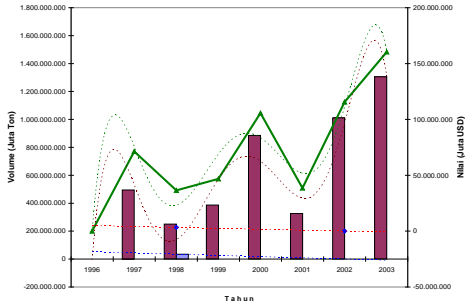


HS 08.08

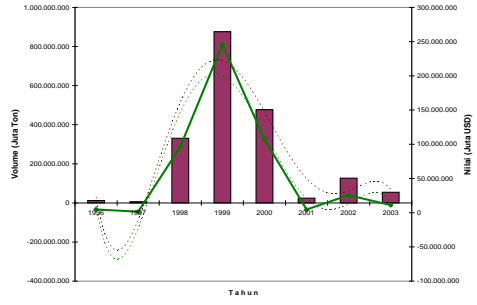


HS 10.01

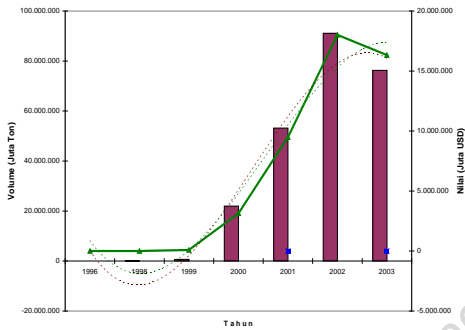
Lampiran Grafik 1. Lanjutan



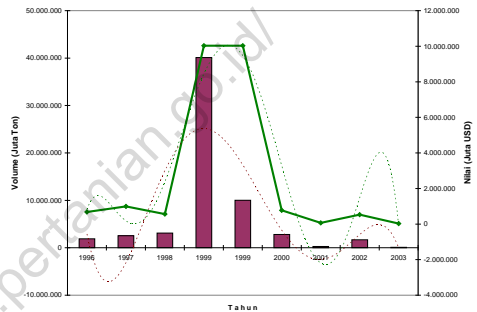
HS 10.05



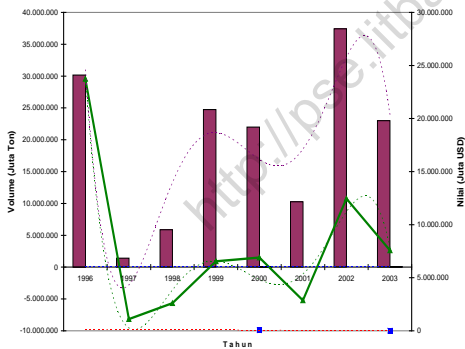
HS 10.06



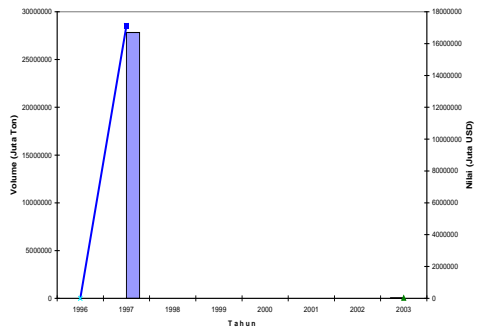
HS 11.01



HS 12.01

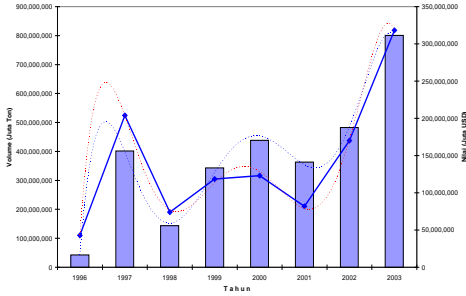


HS 12.02

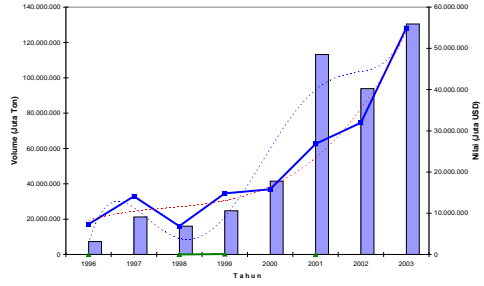


HS 15.07

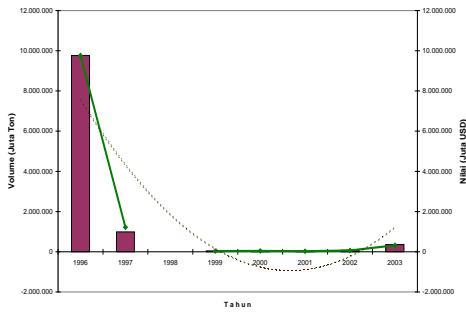
Lampiran Grafik 1. Lanjutan



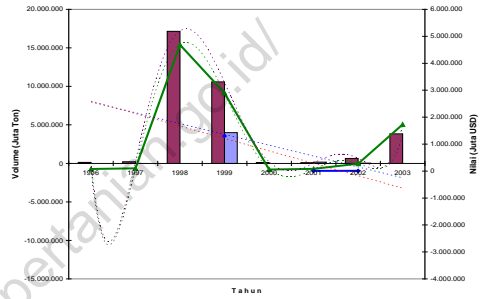
HS 15.11



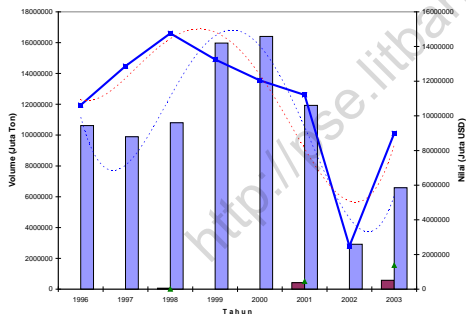
HS 15.13



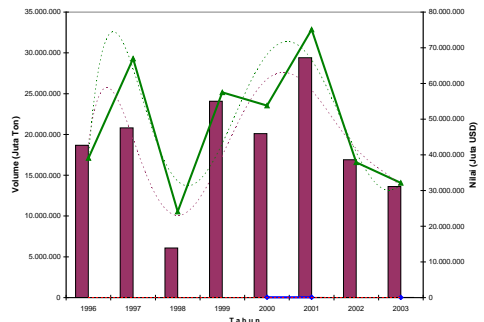
HS 15.20



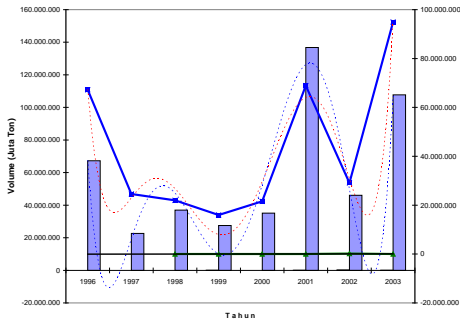
HS 17.02



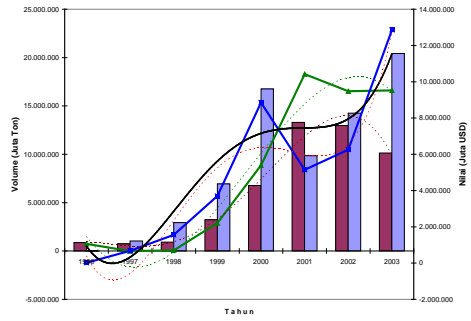
HS 18.01



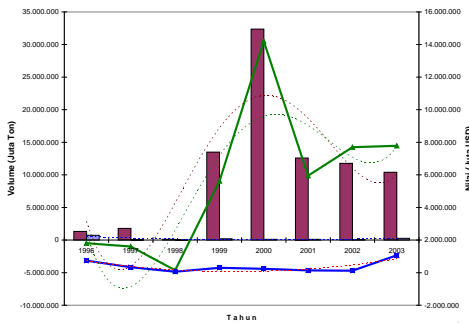
HS 24.01



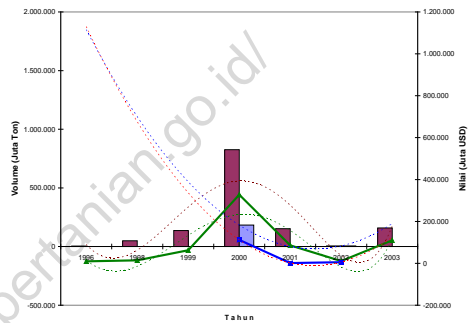
HS 40.01



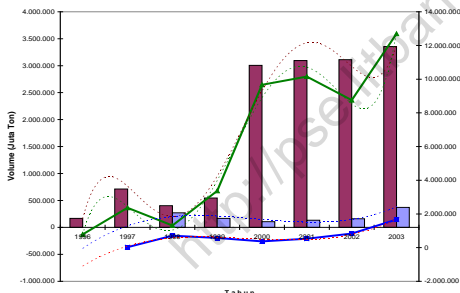
HS 40.02



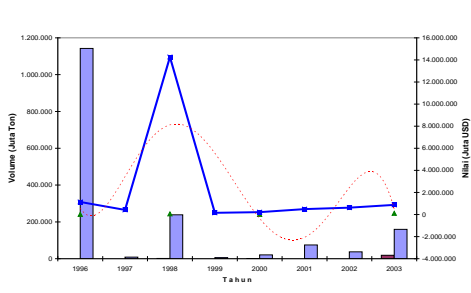
HS 40.11



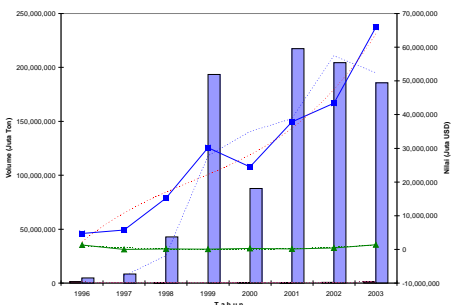
HS 40.12



HS 41.04



HS 41.06

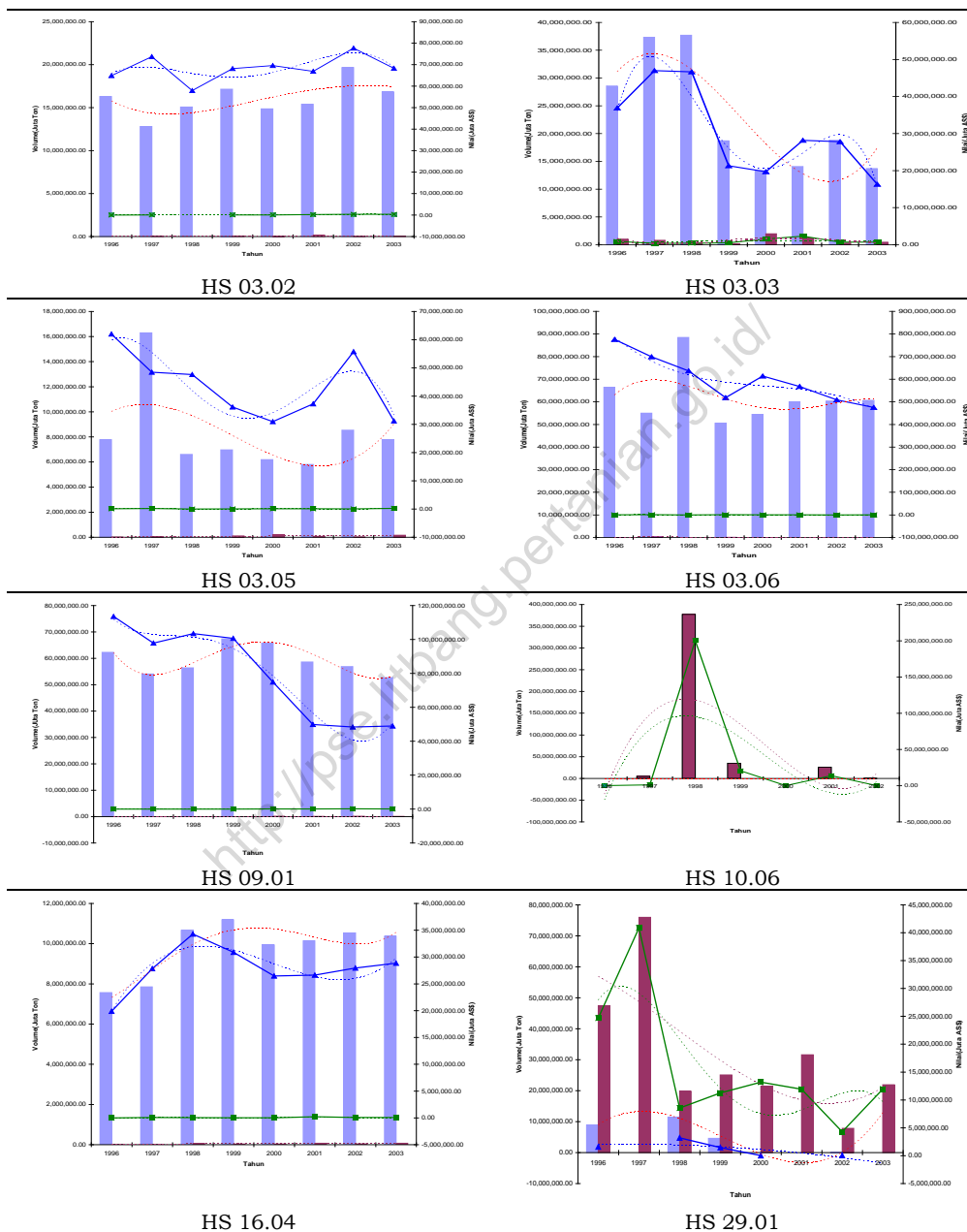


HS 29.05

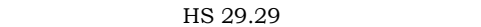
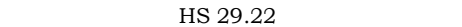
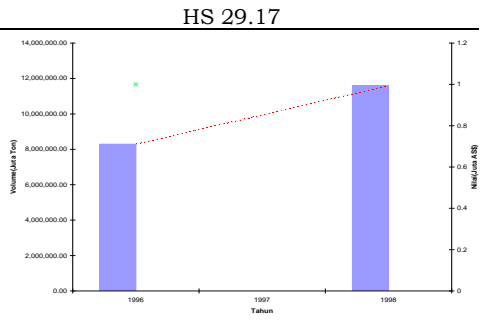
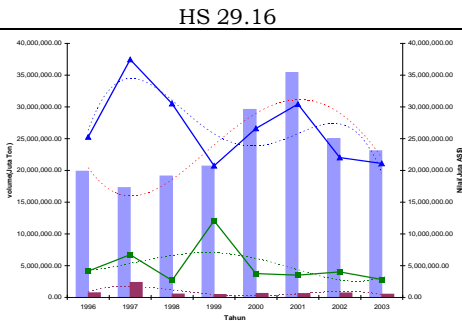
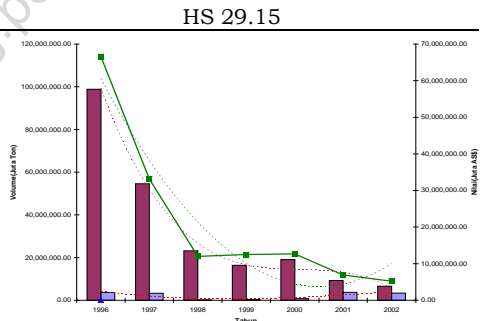
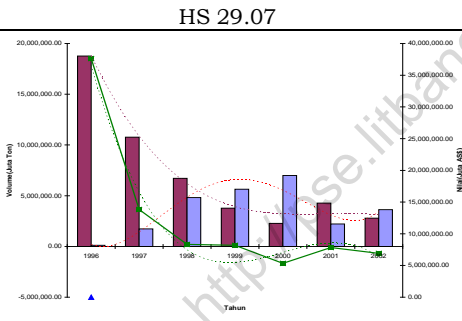
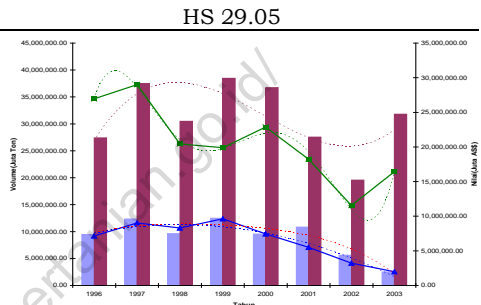
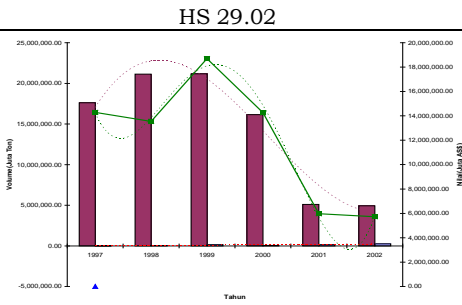
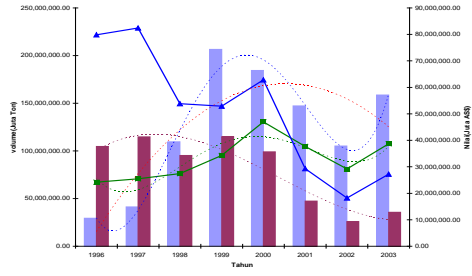
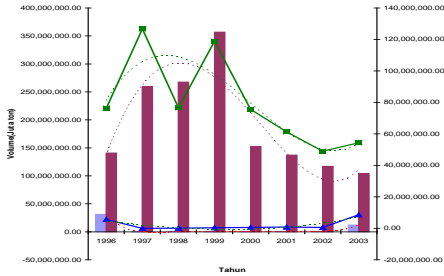
Keterangan:

- : Volume impor
- : Garis *trend* volume impor
- : Nilai impor
- : Garis *trend* nilai impor
- : Volume ekspor
- : Garis *trend* volume ekspor
- : Nilai ekspor
- : Garis *trend* nilai ekspor

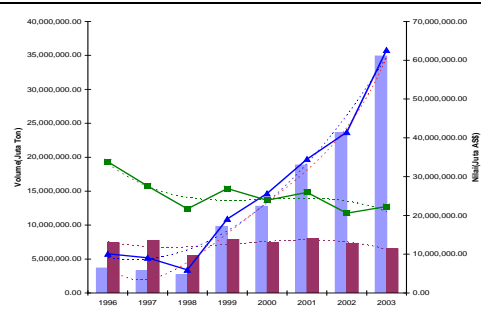
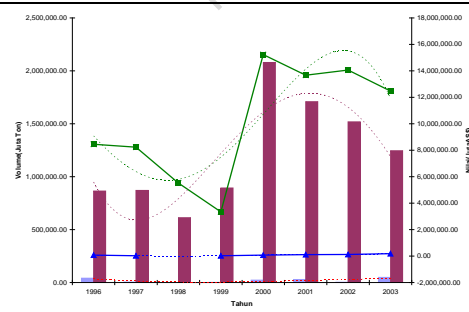
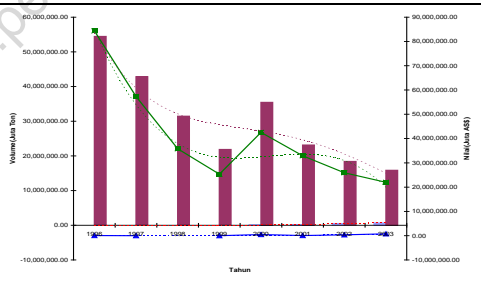
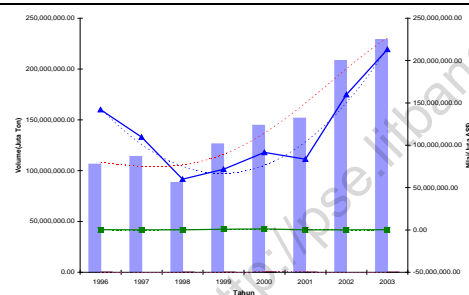
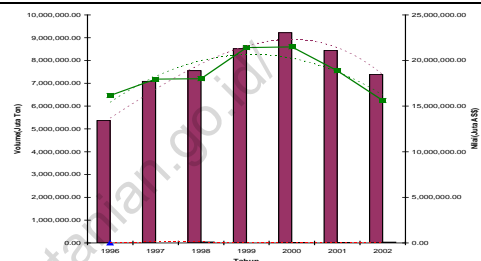
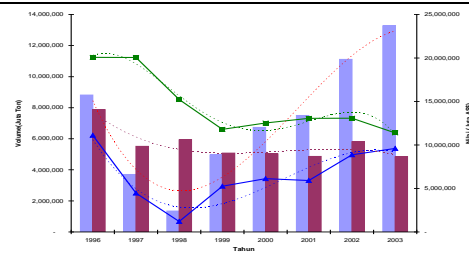
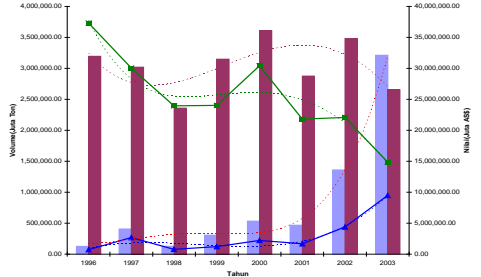
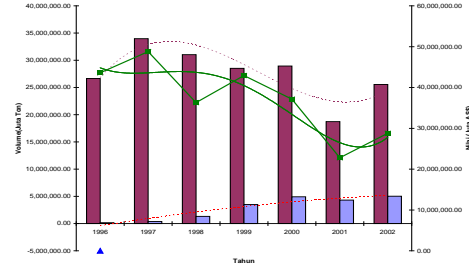
Lampiran Grafik 2. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-Jepang, 1996-2003



Lampiran Grafik 2. Lanjutan



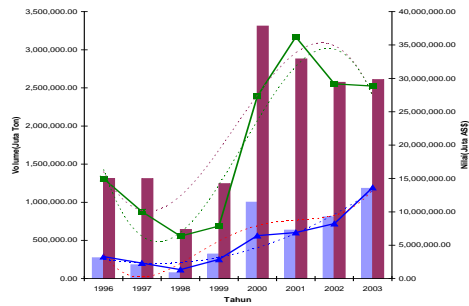
Lampiran Grafik 2. Lanjutan



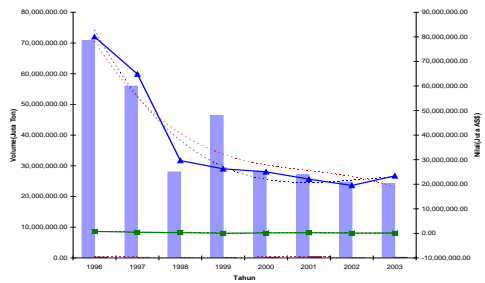
HS 40.09

HS 40.11

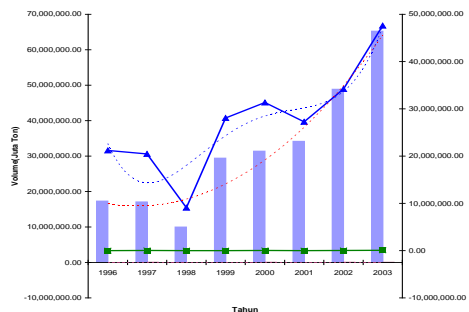
Lampiran Grafik 2. Lanjutan



HS 40.16



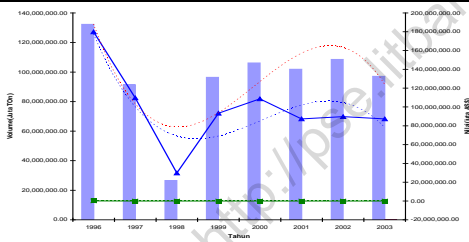
HS 44.07



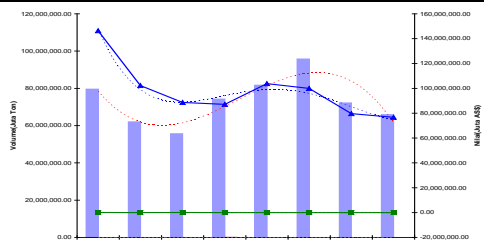
HS 44.09



HS 44.12



HS 44.13



HS 44.18

Keterangan:



: Volume Impor



: Garis Trend Volume Impor



: Nilai Impor



: Garis Trend Nilai Impor



: Volume Ekspor



: Garis Trend Volume Ekspor

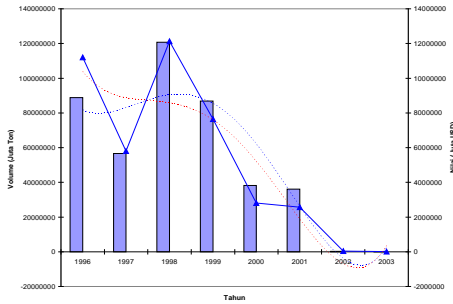


: Nilai Ekspor

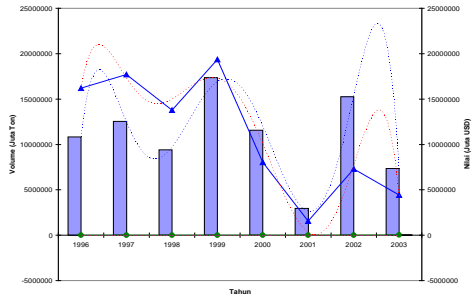


: Garis Trend Nilai Ekspor

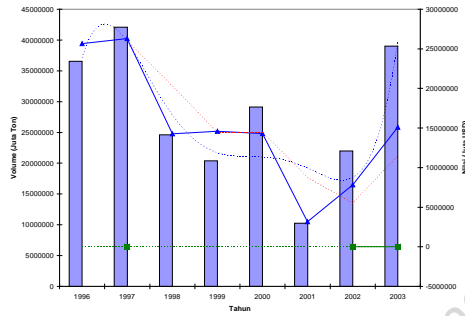
Lampiran Grafik 3. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-Korea Selatan, 1996-2003



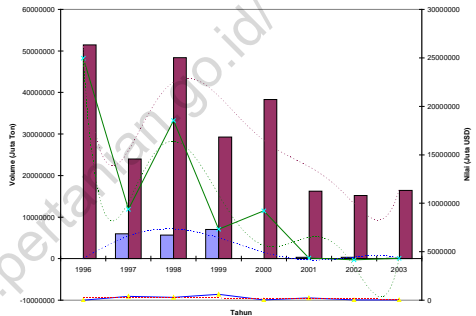
HS 07.14



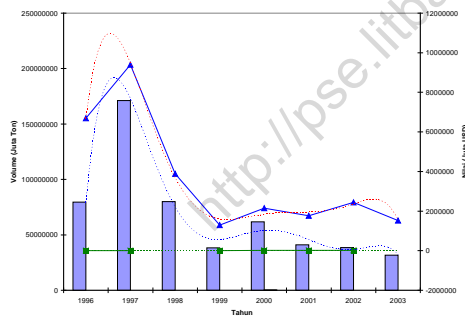
HS 09.01



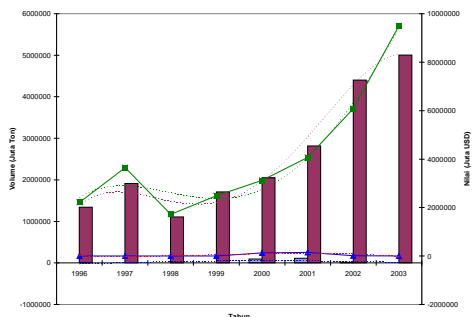
HS 15.13



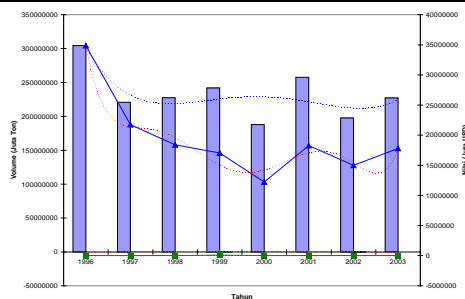
HS 17.01



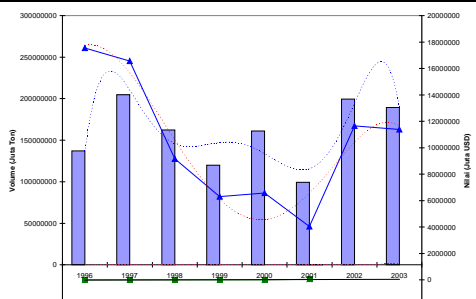
HS 17.03



HS 21.06

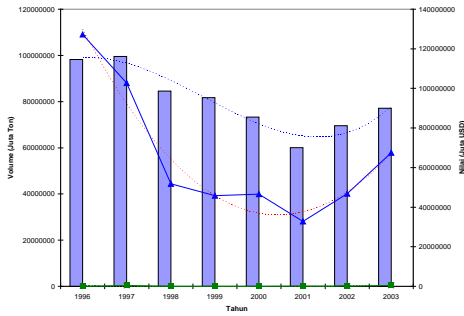


HS 23.02

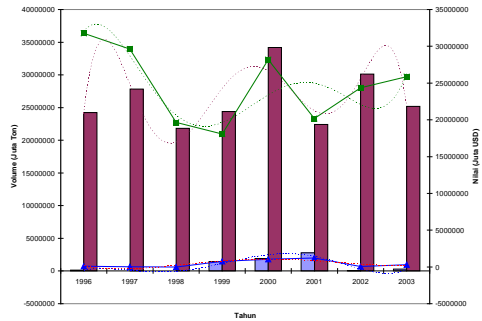


HS 23.06

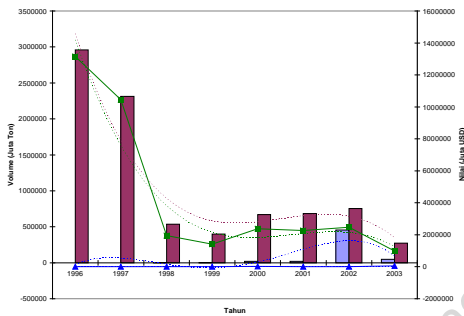
Lampiran Grafik 3. Lanjutan



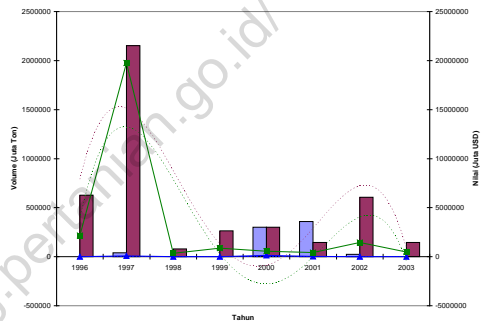
HS 40.01



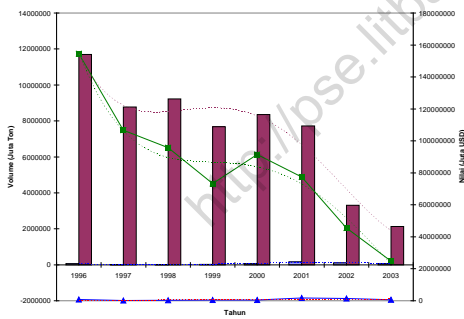
HS 40.02



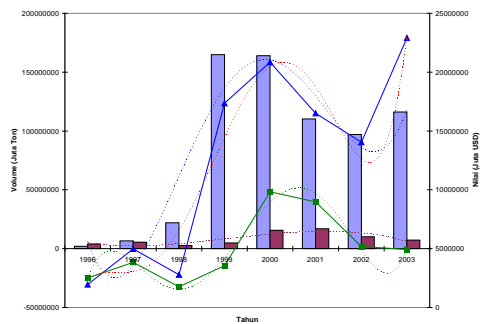
HS 40.05



HS 40.10



HS 41.04



HS 29.05

Keterangan:

- : Volume Impor
- : Garis *Trend* Volume Impor
- : Nilai Impor
- : Garis *Trend* Nilai Impor
- : Volume Ekspor
- : Garis *Trend* Volume Ekspor
- : Nilai Ekspor
- : Garis *Trend* Nilai Ekspor

